LAWAN TEROR NEGARA DAN SIPIL !



SERUM

Untuk Perjuangan Melawan Kapitalisme dan Negara



No. #03 Juni 2012



EDITORIAL

MENOLAK TEROR NEGARA MAUPUN SIPIL !

Sudah 14 tahun sudah *reformasi* berlalu. Apakah "kebebasan" yang dulu dikebiri oleh Orde Baru telah benar-benar dirasakan masyarakat saat ini? Kenyataannya, podium kekuasaan memang berganti pada sosok yang lain, namun sistem yang berdasar pada represi tetap mencengkeram individu dan masyarakat secara luas.

Represi dan teror kini tidak saja dilakukan oleh negara dan aparatusnya secara tersistematis, namun juga oleh masyarakat sipil yang bertindak reaksioner ala fasis. Berjejer peristiwa kekerasan yang dialami kelompok-kelompok minoritas dan elemen gerakan perjuangan, maupun masyarakat umum lainnya.

Pengerahan TNI dalam penanganan demonstrasi seperti yang terjadi dalam protes anti kenaikan BBM Maret lalu misalnya, menunjukkan upaya sistematis mematikan perlawanan. Disahkannya Undang-undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) juga dapat dipandang sebagai jalan baru negara memperkuat legitimasi dan dominasinya.

Aturan-aturan formal ini secara langsung maupun tidak, lantas meningkatkan kepercayaan diri aparat negara menjadi lebih arogan dan telanjang dalam melakukan intimidasi di ruang-ruang sosial secara terbuka. Aksi penembakan dan pemukulan yang dilakukan secara terbuka oleh tentara yang terekam di Palmerah, Jakarta terhadap seorang pengendara motor beberapa waktu lalu misalnya.

Gejala ini bahkan menjangkiti masyarakat secara umum, seperti seorang pengusaha kaya Iswahyudi Anshar, yang menodongkan pistolnya ke pekerja restoran Cork & Screw, Jakarta. Hal tersebut adalah contoh dari puncak gunung es fenomena ini.

Pada tataran lebih luas juga terdapat arogansi dan represi fasistik yang diumbar oleh beberapa kelompok-kelompok fundamentalis, seperti Front Pembela Islam dan sejenisnya, yang menyebarkan keresahan dan teror dalam masyarakat tanpa terbendung. Dengan berlabel agama, mereka bertindak leluasa dan sewenang-wenang dalam mengebiri kebebasan berkeyakinan terutama pada kelompok-kelompork minoritas.

Represi kelompok sipil terhadap masyarakat umum beserta pembiaran-pembiaran oleh negara merupakan teror dalam rangka kontrol atas populasi. Tujuannya agar kuasa dan kemandirian individu menjadi lumpuh. Hal tersebut merupakan jenis kontrol yang hadir pada kondisi-kondisi tertentu. Jika kontrol oleh aparatus negara terlalu vulgar dan dapat menimbulkan resistensi yang luas, kelompok-kelompok konservatif fasis dapat menjadi alternatif untuk menjaga masyarakat tetap patuh. Bukankah sejarahnya, kelompok-kelompok sipil ini lahir dari kebutuhan untuk mengamankan status quo?

Hasrat mengembangkan pemikiran dan segala aktivitas yang menghidupi pandangan individu atau masyarakat adalah sesuatu yang azasi dan alamiah dalam diri setiap orang. Jika pandangan tersebut berbeda atau bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini diakui negara, hal tersebut dapat mengganggu stabilitas dan hegemoni.

Tatanan sosial yang rapi dan seragam merupakan kondisi ideal untuk menopang penghisapan dan penindasan. Masyarakat yang bungkam adalah masyarakat yang ideal untuk pertumbuhan ekonomi dan pelipatgandaan kapital. Oleh karenanya segala rupa kemajemukan mereka perangi.

Pada saat kelompok-kelompok sipil ini menekan golongan minoritas, menyerang perbedaan, dan mengeksploitasi identitas, di saat bersamaan negara meredam keresahan dan kemarahan warga yang jengah akan hal tersebut. Mereka dimanipulasi untuk tidak menempuh konfrontasi langsung, atau mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum.

Jelaslah bahwa negara dan kelompok fasis saling beriringan dalam menekan masyarakat yang plural demi menciptakan kepasifan dan kepatuhan massal. Kebebasan, toleransi dan keberagaman tidak punya masa depan di mata kelompok sipil reaksioner dan negara.

Maka, dengan alasan apapun aksi negara dan kelompok sipil lainnya yang berupaya menyeragamkan masyarakat tidak bisa dibiarkan. Kita harus melawan setiap upaya penyeragaman dan penindasan seperti ini. Kita juga harus senantiasa mengingat, ancaman untuk direpresi secara fisik akan datang menghampiri kita jika penaklukan dengan gaya 'lembut' tidak manjur dalam penjinakan.

Kita mesti melawan represi dan teror negara maupun sipil yang memaksakan keinginannya untuk ditaati. Akan tetapi semenjak kita tahu bahwa penguatan negara dan teror kelompok fasis merupakan hal yang tak terpisahkan, dan menjadi ancaman abadi bagi kebebasan sejati, maka kita tidak bisa menempuhnya dengan berharap atau mendesak agar negara memerangi kelompok-kelompok sipil reaksioner tersebut. Kita juga tidak bisa menggantungkan perjuangan pada proses-proses hukum dan konstitusi, yang hanya menggiring pada penguatan negara.

Perjuangan melawan penindasan dan teror dari negara maupun kelompok sipil reaksioner hanya bisa ditempuh oleh perjuangan dan solidaritas rakyat yang independen dan horizontal, bukan dengan penguatan negara.

Untuk itu, kita mesti membangun solidaritas yang kuat untuk melawan mereka yang terobsesi pada ketunggalan. Kita mesti bersiap dengan mempersenjatai diri dan pandangan kita tentang dunia yang layak dan penuh warna, untuk memperjuangkannya sepenuh hati. Jika kita kuat, mereka dapat melemah. Begitu pula sebaliknya!

SERUM

Untuk Perjuangan Melawan Kapitalisme dan Negara

SERUM diterbitkan dan didistribusikan secara mandiri sebagai bagian dari perjuangan melawan kapitalisme dan otoritarianisme.

Penerbitan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan pandangan mengenai dunia yang sedang berjalan dan mendorong pencarian dan penciptaan bentuk-bentuk kehidupan alternatif yang baru.

TIM REDAKSI

Alisa Dita Manimpian, Burhan May Lee, Ishmael Yahalah, Theo Olimpus, Isse Damazcozy, Nurul Huda

KONTRIBUSI

Kami menerima kontribusi berupa laporan perjuangan, artikel, resensi, puisi, esai, foto, ilustrasi, dll.

Kami juga membuka pintu untuk donasi tidak terikat bagi kalian yang bersimpati dan mendukung penerbitan edisi mendatang.

Untuk tanggapan dan kritik, serta komunikasi lanjut, hubungi kami di alamat kontak tercantum.

KONTAK

kontinum@yahoo.com

www.kontinum.org/serum

facebook.com/tim.kontinum

@timkontinum

~~085656267074~~ (sms)



Mengapa Kami Menerbitkan Koran?

Pembaca terhormat… Selamat berjumpa lagi.

Kini Serum hadir dalam format baru. Ini merupakan pencapaian yang telah lama kami niatkan. Penerbitan ini merupakan bagian dari keinginan kami untuk melihat kemajuan yang lebih besar dari perjuangan untuk perubahan sosial.

Kami ber-pendirian bahwa salah satu infrastruktur perjuangan adalah media. Selama ini kapitalisme dan negara leluasa mengontrol dan mengorganisir penghisapan dan penindasan, mengebiri imajinasi, dan memupuk rasa takut dan rasa tidak percaya diri kita. Mereka membunuh keinginan kita akan kehidupan yang lebih layak.

Tapi bagaimana mereka bisa seleluasa itu? Mereka memiliki perangkat ideologis yang kuat dan mencengkeram yakni media massa, selain perangkat-perangkat kekerasan seperti tentara dan polisi, atau penjara tentunya. Melalui media massa, mereka menyebar racun lewat berita, tayangan, siaran, tontonan, lembaran, hiburan, dan atmosfer kehidupan. Mereka memapankan pandangan, ilusi dan mitos-mitos tentang kesejahteraan, kesuksesan, pengorbanan dan takdir hidup.

Tidak mengherankan bagaimana media massa selalu menyudutkan perjuangan rakyat, mencaci-maki orang-orang yang marah dan mencapnya sebagai pembuat onar, mengekspos lalu menjual tragedi kehidupan, serta menyembunyikan fakta-fakta dari kekejaman kapitalisme dan negara.

Ironisnya, pergerakan kita bergantung pada alat-alat yang dimiliki oleh musuh. Kita selalu terjebak dalam logika yang dimiliki oleh mereka. Ke dalam sistem pendidikan mereka, pemahaman ekonomi mereka, dan media milik mereka. Dengan begitu, sangat mudah bagi mereka untuk mengontrol dan memanipulasi keinginan dan arah yang kita ingin capai.

Perjuangan kita tidak bisa menyandarkan pada logika media massa yang dimiliki dan dikontrol oleh pemilik modal, kaum elit dan bajingan politik. Kita harus mengevaluasi kebiasaan melakukan sesuatu untuk menarik perhatian mereka. Media kapitalis adalah racun bagi pemikiran dan kehidupan kita.

Atas dasar itulah, kami mempublikasikan media perjuangan berupa surat kabar atau koran –sebagaimana yang hadir di hadapan anda sekarang ini. Media sebagai alat konfrontasi dalam gagasan, dan juga alat menyebar imajinasi tentang dunia dan kehidupan seperti apa yang layak untuk dihuni, dan media sebagai pemupuk rasa berani, solidaritas dan empati.

Media adalah kebutuhan yang sangat penting untuk bertarung melawan sistem gagasan modern kapitalis, melawan ide-ide korup, diktator, merusak dan merendahkan kehidupan.

Disini kami ingin Serum menjadi media yang hadir untuk menjadi negasi atas media arus utama. Media yang dapat memperlihatkan bahwa dunia tidak sedang baik baik saja. Bahwa ada perjuangan dan perlawanan dimana-mana –perjuangan petani atas tanahnya yang dirampas negara dan korporasi, perjuangan masyarakat miskin urban melawan keterasingan di kota-kota, perjuangan pekerja di pabrik dan kantor-kantor, dan lainnya.

Lewat Serum juga, kami ingin berbicara dengan lebih banyak orang ketimbang sebelumnya, berdiskusi, membangun jejaring dan solidaritas yang lebih luas serta mengabarkan dan memberikan semangat kepada lebih banyak perlawanan ketimbang sebelumnya.

Maka penerbitan Serum ini adalah untuk lebih banyak pembaca dari semua kalangan. Kami ingin ini berkembang dan menyebar di ruang sosial yang lebih luas dan menawarkan gagasan serta inspirasi yang 'betul-betul alternatif' yang bisa menyulut lebih banyak api perlawanan.

Kami sepenuhnya percaya bahwa selama ada pemahaman yang merata, rakyat sebenarnya sanggup dan paham untuk mengambil apa yang mesti dilakukannya, tanpa komando dan kontrol terpusat dari elit gerakan.

Dan melalui Serum, kami tidak ingin berhenti hanya memproduksi lembaran-lembaran yang berisi teks dan gambar, yang melaporkan berbagai perjuangan sosial serta menawarkan gagasan-gagasan alternatif. Tetapi kami juga berkeinginan untuk menjadikan koran ini sebagai alat pengorganisiran yang melekat di dalamnya, yakni melalui proses penulisan, pendistribusian dan pengelolaan media dengan manajemen yang non-hirarkis. Kami ingin membuktikan bahwa setiap aspek-aspek kehidupan dapat diorganisir dengan relasi yang non-hirarkis.

Masyarakat Dayak vs Korporasi Sawit

DEMI HUTAN KAMI MELAWAN !



Sebelumnya, masyarakat Dayak Iban Semuying hidup bersahaja selaras dengan alam mereka. Hingga pada tahun 2005 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari datang lalu menyerobot hutan adat yang sudah turun temurun menjadi sandaran kehidupan warga.

Setahun sebelumnya perusahaan sawit ini mengantongi izin beroperasi dari pemerintah kabupaten pada lokasi seluas 20.000 hektar di Kecamatan Jagoi Babang. Di dalam izin lokasi yang dimiliki perusahaan itu, 1.420 hektar diantaranya merupakan hak ulayat warga adat Dayak Iban. PT. Ledo Lestari yang merupakan anak perusahaan Grup Duta Palma Nusantara ini, awalnya hanya membuka jalan di dekat areal hutan adat. Namun seiring berjalannya waktu perusahaan terus memperluas lahan garapan dengan menyerobot ruang kelola masyarakat tanpa permisi hingga merambah hutan adat.

Selama ini masyarakat sudah mencoba memperjuangkan hak atas hutan tersebut dengan menyampaikannya kepada pemerintah dari tingkat daerah, provinsi hingga pemerintah pusat. Bahkan hingga ke tingkat internasional melalui testimoni dan penyampaian pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pada 15 Desember 2009 tanah tersebut telah ditetapkan oleh Bupati Bengkayang sebagai kawasan Hutan Adat Desa Semuying Jaya seluas 1.420 hektar yang kemudian dipertegas dengan SK nomor 30A tahun 2010. Namun sebagaimana watak semua pemerintahan yang selalu berpihak pada pemodal dan pengusaha, teriakan masyarakat ini tidak didengarkan dan Ledo Lestari dengan bebas membabat hutan dan menanaminya dengan kelapa sawit.

Menyadari bahwa pemerintah korup yang bergandengan tangan dengan perusahaan rakus takkan melepaskan hutan adat mereka, warga Semunying sejak 7 April 2012 selama seminggu menduduki dan menyegel kantor perusahaan, menyandera beberapa alat berat dan kendaraan operasional, menutup tempat pembibitan dan menghentikan penebangan hutan yang masih berlangsung. "Senin pagi, kami menghentikan upaya pembabatan hutan adat yang masih terus berlangsung. Sejak senin pekan lalu, kami secara bertahap sudah menahan tiga ekskavator, tiga truk, tiga sepeda motor, dua mesin gergaji, satu buldoser, dan menutup perkantoran, serta pembibitan milik PT Ledo Lestari. Kami menuntut pengembalian hak kami!" ujar Sekertaris Desa Semunying Jaya, Abupilah.

Warga menegaskan alasan penolakan tersebut karena mereka tahu bahwa dengan dibukanya perkebunan sawit, maka hutan, tanah, kebun, lahan perladangan dan perburuan, serta tempat mencari bahan rumah mereka akan hilang. Adat istiadat dan budaya masyarakat pun akan musnah. Selain itu selama ini sungai yang menjadi sumber air bersih warga ditutup oleh perusahaan, sehingga mereka kesulitan memperoleh air bersih.

Pihak perusahaan tetap bersikeras ingin terus beroperasi dengan alasan telah memperoleh izin dari pemerintah. Perusahaan juga menganggap penetapan hutan tersebut sebagai hutan adat yang dilindungi lima tahun setelah mereka berproduksi, tidak bisa serta merta menghentikan aktivitas perkebunan sawit. Pada akhirnya PT. Ledo Lestari tetap beroperasi karena kantor dan kendaraan operasional yang disita oleh masyarakat hanya sebagian kecil dari jumlah keseleruhan peralatan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh perusahaan.

[BM.Lee]

KESADARAN ANTI-TAMBANG DI NTT

Lima tahun terakhir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat akomodatif dengan investasi pertambangan. Sejumlah ijin pertambangan tingkat Provinsi dan Kabupaten dikeluarkan oleh pemerintah, seperti pertambangan pasir besi, emas, biji besi, uranium, tembaga dan lain-lain. Semenjak era otonomi daerah diberlakukan, NTT semakin terusik oleh kehadiran pertambangan.

Situasi pertambangan di NTT memang mencengangkan. Sejak tahun 2007, aktivitas industri ekstraktif marak dilakukan di seluruh wilayah kepulauan NTT. Jumlah pengajuan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kupang mencapai 80 perusahaan, dan rata-rata sudah beroperasi. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pengajuan yang masuk sebanyak 176 proyek; Kabupaten Timor Tengah Utara 139; serta Kabupaten Belu ada 89 perusahaan tambang yang sudah beroperasi. Sementara itu juga sudah banyak operasi tambang yang telah lama berjalan seperti tambang emas di Sumba Timur, Sumba Tengah, Lembata, Manggarai Barat, Alor dan Flores Timur, atau tambang pasir besi di Manggarai Timur, Sikka, dan Lembata. Beberapa diantaranya bahkan terletak di hutan konservasi.

Akan tetapi ini juga disusul oleh penolakan dimana-mana. Tingkat protes berlangsung secara terbuka mulai dari paling timur Lembata, hingga ujung barat Flores di Manggarai Barat. Gerakan aksi menolak tambang juga merebak hingga ke tanah Sumba, Timor dan Alor.

Maraknya gerakan perlawanan terhadap pertambangan di NTT ini disebabkan mulai menguatnya kesadaran rakyat terhadap kondisi dan pengalaman yang terjadi di daerah-daerah tambang. Dimana-mana pertambangan hanya menyebabkan kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, menurunnya kualitas kesehatan, hilangnya lingkungan hidup yang sehat dan baik, hilangnya kesempatan pendidikan, kerusakan sumber daya alam untuk kepentingan generasi depan, dan kehilangan tanah ulayat.

Ada kesadaran di kalangan rakyat bahwa industri pertambangan adalah strategi besar untuk menendang rakyat dari tanah tempatnya hidup, dan melucuti mereka sehingga tidak lagi punya apa-apa kecuali tenaga untuk dipaksa bekerja dalam industri. Hal ini berkembang di kalangan intelektual dan rohaniawan. "Tambang dimanapun tidak pernah menguntungkan masyarakat. Masyarakat memang harus menolak pertambangan, dan hal penting yang harus dilakukan adalah masyarakat sendiri harus tahu bahwa tambang adalah setan yang menghancurkan khususnya masyarakat sekitar tambang," tegas Pater Simon, salah seorang rohaniawan dari Ende.

Sementara di kalangan aktivis lingkungan berkembang kritik terhadap aspek manfaat dan mitos-mitos seputar pertambangan. Mitos pertama, pertambangan adalah industri padat modal dan tidak berisiko tinggi, sementara faktanya banyak gunung yang dibongkar, banyak tanah yang berlobang dan meninggalkan banyak kerusakan lingkungan; kedua, pertambangan bikin kesejahteraan rakyat, faktanya Freport di Papua menyebabkan orang asli merana kemiskinan, padahal triliunan rupiah kekayaan mereka dicuri keluar oleh. Begitu juga di Aceh Utara dan Lhoukseumawe dimana sentral kemiskinan justru berada di wilayah 7 industri strategis, atau pusat kemiskinan di Kutai Kartanegara yang telah mengeluarkan 700 izin pertambangan, justru berada di kawasan pertambangan dan sekitarnya.

Mitos ketiga adalah pertambangan penyumbang devisa negara, namun faktanya hanya 1–3 % kontribusi pertambangan ke devisa negara. Sementara yang keempat, pertambangan adalah industri yang menyediakan lapangan kerja, namun faktanya paling maksimal orang kampung hanya diplot sebagai tukang jahit karung dan sejenisnya.

"Katanya pertambangan untuk menyejahterakan masyarakat. Tapi masyarakat yang mana? Sistem bagi hasil 4% hanya diterima oleh pemerintah pusat, 1,5% oleh pemerintah propinsi, 2,5 % oleh pemerintah daerah penghasil, 2 % utk pemerintah kab/kota di sekitarnya. Sisanya 90% dibawa ke luar oleh para investor" kata salah seorang aktivis, Markus Tulu.

Sementara itu bagi masyarakat umum yang sehari-hari masih berpegang pada tradisi dan pandangan adat, kesadaran anti-tambang utamanya didorong oleh pandangan bahwa tanah bagi masyarakat asli di NTT adalah Ibu –-sumber dari segala penghidupan.

"Tanah bagi kami di Lembata-NTT adalah Ibu yang memberikan sumber kehidupan. Kami lebih memilih mati daripada membiarkan ibu kami diperkosa oleh investor," kata Eman Ubuq, dari Pulau Lembata yang juga menjadi koordinator Barisan Rakyat Bersatu Lembata.

[Kontribusi : Vincent, Flores]

6 Tahun Warga Porong vs Lapindo Brantas Inc

TETAP BERJUANG BERANTAS LAPINDO

Beberapa waktu lalu, 3.000 warga korban Lumpur Lapindo yang tempat tinggalnya berada dalam areal terdampak, kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Kota Surabaya. Mereka meminta pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman ke PT Minarak Lapindo Jaya agar mampu melunasi ganti rugi. Pengunjuk rasa berasal dari dalam peta areal terdampak, seperti Desa Renokenongo, Siring, Jatirejo, Glagah Arum, Kecamatan Porong, serta Desa Kedungbendo dan Ketapang, Kecamatan Tanggulangin.

Unjuk rasa dilakukan warga, karena mereka menilai, pemerintah telah bertindak diskriminatif. Karena warga yang tinggal diluar peta areal terdampak justru pembayaran ganti ruginya telah lunas, sementara mereka belum. Untuk itu, mereka mendesak Gubernur Jatim Soekarwo agar mau menyetujui pengajuan peminjaman PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) ke Bank Jatim senilai Rp 600 miliar. Sempat terjadi kericuhan pada saat unjuk rasa. Warga yang geram karena Soekarwo tidak menemui mereka, menarik pagar kawat berduri dan melempari aparat dengan sandal, tongkat kayu, dan batu. Polisi kemudian membubarkan unjuk rasa dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon dan gas air mata ke arah korban lumpur.

Vice President PT MLJ Andi Darussalam Tabussala mengakui, tunggakan MLJ kepada korban lumpur di dalam peta areal terdampak masih sebesar Rp 1,023 triliun. MLJ baru bisa melunasi keseluruhan hingga akhir Desember 2012. Hingga Mei 2012, korban Lumpur Lapindo memilih untuk bertahan dan menduduki tanggul titik 25 hingga tuntutan mereka terpenuhi. Tak hanya menuntut ganti rugi, warga pun juga meminta agar MLJ segera menerbitkan sertifikat tanah ganti rugi kepada warga yang rumahnya diratakan oleh semburan lumpur.

Enam tahun berlangsung, tidak lantas membuat kita lupa tentang kesengsaraan bagi rakyat Porong, Sidoarjo. Parahnya, sejak awal luapan lumpur panas tersebut telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana alam. Sehingga anggaran ganti rugi lagi-lagi tetap harus dirampas dari kas negara yang berasal dari pajak masyarakat. PT MLJ, bisa sedikit lega mendapat angin segar, perusahaan itu tidak sendiri dalam menanggung kerugian warga yang sudah menjadi kewajiban mereka.

Luapan lumpur Lapindo adalah contoh nyata, kejahatan korporasi dan negara terhadap manusia. Tapi kenyataannya, enam tahun berlalu, permasalahan ganti rugi tak kunjung selesai. Bahkan kondisi lokasi yang terkena dampak lumpur semakin meluas. Terakhir dikabarkan bahwa, kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, terancam jebol karena air mulai merembes di kolam penampungan lumpur Lapindo.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya telah membuat ribuan nyawa kehilangan tempat tinggal, tempat berlindung. Yang lebih miris, warga harus senantiasa siap menjadi pengungsi dalam ruang hidup mereka sendiri.

Di tengah derita tersebut, malah terlontar tanggapan konyol dari Aburizal Bakrie, pemimpin utama perusahaan Bakrie Group. Aburizal mengatakan bahwa korban semburan Lumpur Lapindo telah menerima ganti rugi di atas rata-rata. Lebih naifnya, dalam pemberitaan tersebut, Ketua Umum Golkar itu seolah-olah menegaskan bahwa ganti rugi di atas rata-rata tersebut bisa menjadikan warga Porong menjadi milyarder.

Warga tidak mengharapkan belas kasih, tapi memperjuangkan hak untuk mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal, yang dihilangkan oleh rakusnya aktivitas korporasi dalam meraup akumulasi modal. Tidak ada jalan lain kecuali sabotase!

[Isse]





TITIK API

Maret
Rabu, 21 Maret 2012
Pemrotes anti kenaikan BBM di Makassar yang tergabung dalam GRM (Gerakan Rakyat Makassar) meluapkan kemarahannya atas kemiskinan dan kesengsaraan yang disebabkan oleh negara dan kapitalisme. Mereka menghentikan paksa truk pengangkut tabung elpiji dan membagi-bagikannya kepada pengguna jalan yang lewat dan menduduki SPBU lalu membagikan bensin secara gratis.

Jumat, 30 Maret 2012
Protes anti kenaikan BBM memuncak, di Jakarta pagar kantor DPR-RI dirusak dan dijebol oleh demonstran yang memaksa masuk ke dalam area gedung. Polisi yang berjaga-jaga akhirnya bertindak represif dengan menembakkan gas air mata dan mengerahkan *watercanon*, menangkap dan memukuli demonstran.

Di Makassar protes berlangsung hingga tengah malam, mahasiswa Unismuh dan UIN Alauddin yang beberapa hari terakhir menduduki jalan Alauddin Makassar-Gowa dan merusak pos polisi, akhirnya dibubarkan paksa oleh Brimob. Di tengah malam itu mahasiswa dihalau masuk ke dalam kampusnya dengan hujan gas air mata disertai pukulan, tendangan dan hantaman.

April
Rabu, 11 April 2012
Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Rabu menggelar demonstrasi di depan gerbang gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes atas draft terbaru Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi.

Jumat, 13 April 2012
Kedatangan Wakil Presiden Boediono ke Medan, disambut aksi protes sejumlah petani yang menjadi korban dalam sejumlah konflik agraria yang selama ini terjadi dan belum berhasil dituntaskan. Pada aksi tersebut, petani dan wartawan yang berada di lokasi menjadi korban aksi kekerasan yang dilakukan anggota TNI dari Arhanudse 11 yang bertindak sangat represif.

Sabtu 14 April 2012
Ribuan orang dari berbagai kecamatan di Manggarai Barat berdemonstrasi di Labuan Bajo, ibukota Manggarai Barat. Mereka yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Tambang (Geram) melakukan aksi menolak investasi pertambangan di Flores dan Lembata. Bagi warga, keberadaan tambang bukan saja merusak lingkungan hidup, tetapi juga mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat..

Senin, 16 April 2012
Ratusan para petani tergabung dalam Komite Tani Menggugat (KTM), melakukan aksi di depan kantor gubernus Sumut, menuntut penyelesaian kasus sengketa tanah di lahan eks HGU PTPN II khususnya masalah tanah di Marendal I, Helvetia, Selambo, Sergai, Pagar Merbau, Dagang Kerawan, dan Naga Kesiangan.

Selasa, 17 April 2012
Puluhan warga miskin Kota Palembang memprotes perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap mereka yang belum memiliki rumah karena terjerat kemiskinan yaitu terhadap undang-undang yang membatasi pengembang membangun rumah ukuran kecil. Protes ini disampaikan mereka dengan cara berunjuk rasa ke Gedung DPRD Sumatra Selatan dan kantor gubernur setempat.

Rabu, 18 April 2012
Tujuh petani asal Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, melakukan aksi mogok makan selama sepuluh hari sebagai bentuk protes terkait sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit PT Lambang Sawit Perkasa, anak usaha Sinar Mas Grup.

Kamis, 19 April 2012
Ribuan buruh PT. Starnesia Garment, sebuah perusahaan pakaian di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, melakukan aksi unjuk rasa di dalam kawasan pabrik. Para buruh protes atas kenaikan upah yang hanya Rp 30.000 per bulan. Padahal seharusnya, gaji mereka naik Rp 200.000 dari upah tahun 2011 menjadi Rp 1.529.000 per bulan.

Sabtu, 21 Apr 2012
Petani Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupatn Deli Serdang Sumatera Utara melakukan protes di areal perkebunan tebu sebagai penolakan terhadap PTPN II yang mencaplok ratusan hektar lahan petani sejak tahun 1964

Selasa, 24 April 2012
Ribuan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan, memperingati 16 tahun 'April Makassar Berdarah' (Amarah) di depan Monumen Mandala. Mereka mengutuk serangan aparat TNI yang menewaskan tiga mahasiswa UMI, 16 tahun lalu. Tiga mahasiswa itu tewas saat menggelar unjuk rasa menentang kenaikan tarif angkutan kota tahun 1996. Aksi Amarah ini diperingati setiap tahun oleh mahasiswa di Makassar.

Kamis, 26 April 2012
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, melakukan protes dan menolak kedatangan Komisi I DPR RI di Jerman. Penolakan ini disampaikan secara bersama oleh para mahasiswa yang hadir di acara tatap muka dengan para anggota DPR RI

Senin, 30 April 2012
Seratusan pedagang asongan di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menggelar aksi protes, menolak rencana PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menggusur pedagang asongan. Rencananya, PT. Pelindo akan menggusur semua pedagang asongan yang berdagang di sekitar pelabuhan Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Mei 2012. Bagi para pedagang, penggusuran itu akan sangat merugikan mereka dan berpotensi menghilangkan mata-pencahariannya.

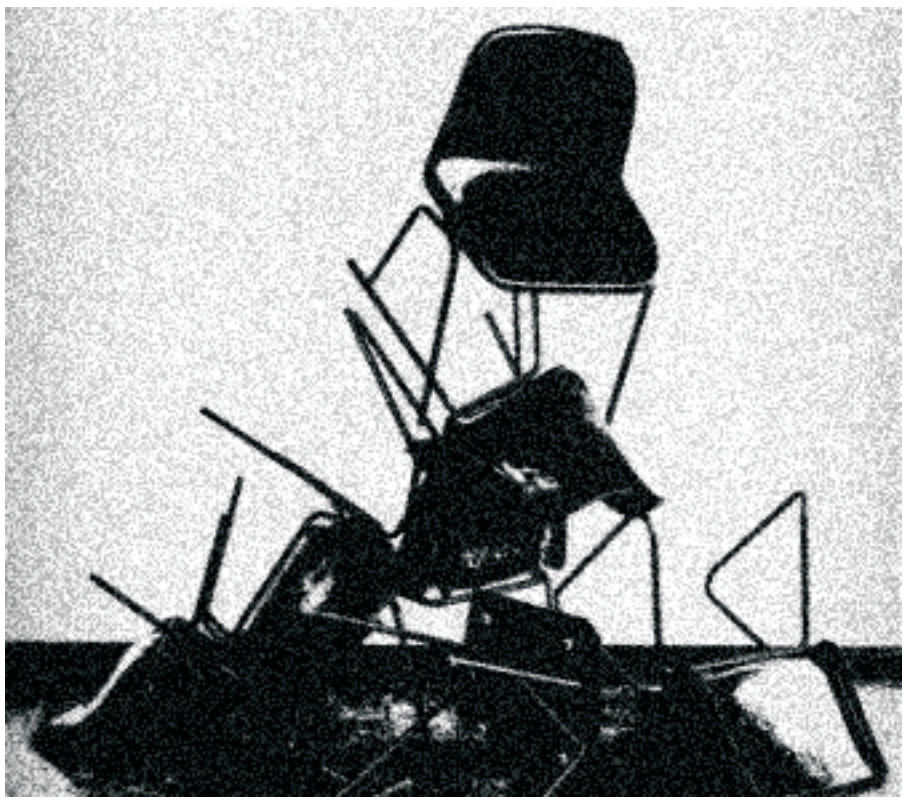
Mei
1 Mei 2012
Mayday diperingati di berbagai daerah. Di Jakarta, ribuan buruh melakukan *long march* dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka untuk mendesak pemerintah mensahkan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di Makassar, Mayday diperingati di *flyover* dan long march ke kantor Gubernur. Di Medan, aksi Maydaya dilakukan dengan memblokir akses utama menuju Bandara Polonia Medan di Jalan Imam Bonjol.

2 Mei 2012
Mahasiswa dari berbagai daerah melakukan aksi untuk memperingati hari pendidikan nasional. Sebagian besar dari aksi ini, menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang Undang Perguruan Tinggi yang mengancam pendidikan makin sulit diakes.

15 Mei 2012
Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu berunjuk rasa di depan Kantor Perhutani Wilayah Indramayau menuntut pengembalian hak pengelolaan hutan kepada warga. Petani yang muak dengan ulah perusahan negara ini berusaha menduduki Perhutani. Usaha mereka dihalangi polisi yang telah disiagakan sebelumnya dan bentrokan pun pecah. Aparat yang didukung Brimob Polda Jawa Barat memukul mundur pengunjukrasa dengan menggunakan gas air mata dan pentungan. Para petani penggarap sudah turun temurun menggantungkan hidupnya pada hutan dan ketika Perhutani melarang warga memanfaatkan hutan, sumber penghidupan mereka pun lenyap.

29 Mei 2012
Warga Desa Bontomaero, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menolak mobil truk pengangkut tambang dan menutup jalur tambang yang melintasi wilayah mereka, Senin (28/5). Puluhan warga menutup jalan dengan menanam sejumlah pohon pisang di jalan. Warga juga meletakkan beberapa batang kayu dan mengangkat pos kamling ke badan jalan untuk menghalangi mobil pengangkut tambang. Aksi dipicu karena warga sekitar tambang merasa resah beberapa bulan terakhir. Mobil tambang yang hilir mudik di wilayah mereka, menimbulkan banyak debu yang dapat mengganggu pernafasan. Truk tambang juga menyebabkan jalan sepanjang tiga kilometer rusak parah.

Pendidikan Itu Seksi



Sudah bukan rahasia lagi jika seseorang ingin mendaftar di fakultas-fakultas ternama pada sebuah universitas terkenal harus rela menghabiskan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dengan harapan peluang kerja yang luas dan penghasilan yang tinggi saat bekerja nantinya. Biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh penyelenggara pendidikan (pemerintah/Negara) dialihkan ke peserta didik melalui biaya administrasi (uang SPP, sumbangan orangtua peserta didik, uang kontribusi pembangunan, dll). Dengan kata lain, peserta didik-lah yang mendanai sebagian besar anggaran pendidikan. Mahasiswa menjadi anak emas, sebagai penyelamat negara dan lembaga pendidikan dari bahaya kebangkrutan. Bukan karena mahasiswa itu rajin, pandai dan berbakti bagi bangsa dan negara. Bukan. Tetapi karena mereka mampu mengisi kas keuangan lembaga-lembaga pendidikan yang sedang menderita kekuarangan biaya dalam pelaksanaan kuliah dan pendidikan yang membutuhkan peningkatan fasilitas dan teknologi canggih. Universitas hari ini tidak lagi melihat seberapa pintar peserta didik dalam mengaktualisasikan ilmunya, tetapi lebih kepada seberapa rela peserta didik menghabiskan energi dan waktunya untuk lebih disiplin dan menyesuaikan diri dengan tempat kerja mereka kelak yang dituntut untuk menghidupi pekerjaannya secara menyeluruh. Intinya, belajar untuk bekerja demi kesejahteraan orang lain, bukan diri sendiri.

Fakultas atau jurusan yang laris misalnya, ekonomi dan bisnis, menejemen, kedokteran, teknik, atau komputer, dianak-emaskan. Bidang pendidikan seperti filsafat, bahasa, sejarah, pendidikan diancam tutup karena kurangnya peminat. Para calon mahasiswa sendiri berbondong-bondong memilih bidang studi yang laris bukan berdasarkan minat dan bakat tetapi prospek pasar kerja yang tersedia sesuai dengan lulusan pendidikan. Kelas kecil sama dengan toko yang sepi. Harus ditutup karena ia membebani ongkos produksi dan dosennnya diberhentikan atau diminta mengajar bidang lain yang bukan minatnya tetapi punya nilai jual.

Alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk berbagai sektor ekonomi tidak ada bedanya dengan "utang dengan bunga yang tinggi". Pendidikan yang mendapatkan peningkatan anggaran APBN merupakan bukti bahwa lembaga pendidikan adalah industri terbesar dan terpenting di dunia, berdampingan dengan industri komputer, telepon genggam, tekstil, minyak, kalau bukan bursa saham. "Utang" pendidikan tidak dibayar dalam bentuk uang oleh universitas atau perguruan tinggi. Alokasi anggaran tersebut dibayar kembali oleh sektor pendidikan melalui peningkatan produksi tenaga kerja terdidik yang diharapkan berkontribusi dalam mendukung jalannya perekonomian hari ini. Karenanya, lembaga pendidikan mesti menyesuaikan diri dengan menyediakan fasilitas lengkap dan berteknologi canggih untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik yang tidak hanya mengandalkan tenaga tapi juga otak yang segar, kreatif, inovatif dan produktif yang siap bersaing di pasar.

Peningkatan kualitas pendidikan (sebatas pada peningkatan fasilitas dan teknologi) mensyaratkan peningkatan pendanaan yang bakal mempersempit akses ke sektor pendidikan. Berbagai gedung perkuliahan, perpustakaan, atau laboratorium gencar dibangun sebagaimana halnya rumah sakit, jalan raya, pusat pertokoan dan bank, jumlah pendaftaran siswa atau mahasiswa meningkat. Lama pendidikan semakin diperpendek, proses kelulusan dipermudah, dan jumlah lulusan diusahakan maksimal serta meningkat secara berkesinambungan. Kantor keuangan lembaga pendidikan menjadi semakin sibuk oleh laju dan besarnya lalu–lintas dana yang masuk dan keluar. Semakin lama semakin sulit bagi kantor keuangan sekolah maupun universitas untuk mengelola sendiri aktifitasnya. Karenanya, mereka harus mengundang kerja sama dengan lembaga lain, khususnya perbankan. Proses pendidikan semakin pudar dan berakibat terhadap pasaran kerja dalam masyarakat yang mendadak sibuk berindustrialisasi.

Segala yang menyangkut dengan lembaga pendidikan menjadi komoditas. Alasannya sederhana, karena pendidikan itu seksi. Lembaga pendidikan menjadi hal yang menggiurkan bagi negara dan pemilik modal. Menggairahkan mereka untuk membuat sebuah industri raksasa dari lembaga pendidikan, secara bertahap dimulai dari perguruan tinggi yang menghasilkan keuntungan besar. Dengan memanfaatkan keluarga sebagai agen penjualan calon tenaga kerja yang merawat dari kecil dan menanamkan kepercayaan bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan dan iming-iming semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi pula pekerjaan yang bisa di dapat, peluang untuk menjadi semakin kaya pun bakal semakin tinggi.

Hal yang sangat penting di sini adalah waktu luang yang peserta didik miliki di luar jam kuliah/sekolah. Sebisa mungkin waktu luang yang mereka miliki digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, serta segala tetek bengek kuliah lainnya hingga perhatian hanya tertuju pada kuliah dan kerja. Kurikulum dan segala detail pelajaran lainnya, seperti tugas-tugas (homework) serta ujian juga diatur sejak awal sebelum masa perkuliahan bukan agar dapat mengefisiensikan jadwal perkuliahan selama satu semester, melainkan untuk menciptakan dan memaksakan situasi kerja seperti iklim pabrik, lalu memastikan bahwa semua peserta didik dapat menjadi terbiasa dengan padatnya waktu kerja yang sudah jelas tidak akan pernah seimbang dengan gaji yang diberikan perusahaan kepada para pekerjanya. 8 jam kuliah selama sehari yang disisipkan ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS), lalu 8 jam waktu luang untuk mengerjakan tugas kuliah, dan 8 jam sisanya digunakan untuk beristirahat sekaligus menyiapkan stamina untuk kembali belajar esok hari. Kembali mengulang aktifitas yang sama, kemudian berulang terus-menerus hingga akhirnya menjadi sebuah rutinitas tak berujung dan menyebabkan kecanduan. pada fase inilah sifat patuh dan disiplin ditanamkan pada peserta didik.

Kecanduan akan pendidikan dijadikan senjata ampuh untuk mengubah kehidupan ini menjadi sebuah arena bertarung dan berkompetisi dalam rangka mencapai efisiensi dan produktifitas tinggi. Bukan untuk mencari siapa yang paling buas dan beringas, tapi mencari siapa diantara para peserta didik ini yang paling patuh terhadap aturan dan rela membanting tulang demi pekerjaannya. Pendidikan menjadi panggung audisi untuk menyeleksi mereka yang siap mati-matian bekerja bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan negara dan pemilik modal.

Melihat tinjauan sejarahnya, tak salah jika pendidikan memang tidak pernah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan. Sejak pemerintahan kolonial Belanda membuka sekolah/universitas untuk kaum pribumi, pendidikan formal tidak pernah terlepas dari kepentingan politik ekonomi kaum yang sedang berkuasa secara politik, ekonomi, maupun budaya. Lebih tegasnya, lembaga pendidikan tidak pernah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya "mencerdaskan kehidupan bangsa" atau memajukan ilmu pengetahuan dunia secara abstrak dan universal, atau mensejahterakan rakyat jelata, melainkan untuk melayani kepentingan pemerintah/negara dan pemilik modal.

Belakangan ini, perbincangan mengenai RUU PT semakin gencar di sejumlah tempat, mulai dari pembicaraan di kantin-kantin, diksusi, hingga di tataran seminar. Aksi penolakan RUU ini juga sempat memanas di beberapa daerah di Indonesia. Pada tanggal 5 April 2012, mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pendidikan Nasional menggelar aksi penolakan terhadap RUU PT di Jakarta. Di Makassar sendiri, aksi-aksi serupa juga mewarnai mingu kedua bulan April 2012. Sejak tanggal 9 hingga tanggal 13 April tahun ini, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar melakukan aksi penolakan terhadap RUU PT. Dua kelompok mahasiswa(i) di Makassar, yakni Gerakan Rakyat Anti Neoliberalisme dan Sekber Perjuangan Rakyat Sulsel, menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RUU Perguruan Tinggi, di fly over Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (10/4/2012).

Belajar dari kegagalan-kegagalan penolakan UU BHP yang justru disempurnakan oleh RUU PT, sekedar menolak sebuah aturan atau kebijakan tidak akan menghasilkan apa-apa. RUU dan aturan lain masih bisa dirumuskan dan ditetapkan jika RUU PT ini ditolak. Karena itu, kita mesti melampaui pemikiran "sekedar" menolak pengesahan RUU PT. Mestinya, menolak segala aturan yang mengekang bagi hidup kita adalah hal yang lebih penting untuk diperjuangkan.

[Theo Olimpus & Nurul Huda]



Yang Dimabuk Dunia

Dengan tidak menyadari posisinya di dunia, orang-orang tidak punya kebutuhan untuk memperbaiki kehidupannya.



Gemericik hujan di sore itu kalah ramai oleh riuh puluhan perempuan yang menyeruak keluar dari gerbang sebuah pabrik. Jam menunjukkan pukul 5 sore, para perempuan itu tiba-tiba saja meluap di bibir jalan, berbicara dan bersenda gurau satu sama lain, terkadang diselingi tawa sembari berjalan menuju simpang jalan. Mereka adalah buruh pabrik PT NCT, sebuah perusahaan eksportir ikan laut di Makassar.

Salah satu di antara mereka adalah Fatma, 39 tahun. Ia sudah 18 tahun bekerja sebagai buruh harian lepas di pabrik yang berada di dalam kompleks Kawasan Industri Makassar (KIMA) itu. Sehari-hari Fatma bertugas membersihkan dan memotong ikan-ikan sebelum dikemas dan dibekukan. Ikan-ikan itu diekspor sampai ke Singapura.

Ikan adalah komoditi ekspor yang cukup menguntungkan. Menurut seorang buruh lain, omzet perusahaan mencapai ratusan juta hingga milyaran dalam sekali pengiriman. Tapi nilai menggiurkan itu berbanding terbalik dengan kondisi Fatma dan buruh-buruh lainnya.

"Tidak ada kontrak, kami di bayar setiap hari setelah bekerja seperti hari ini", lirihnya. Bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, Fatma hanya menerima upah sebesar Rp. 35.000. "Jika ikan banyak, kami lembur sampai jam 5 sore, dan gaji hanya ditambah 5 ribu", tambahnya.

Ketika musim barat tiba, buruh pabrik yang kurang lebih berjumlah 200 orang ini seringkali dirumahkan. Kurangnya pasokan ikan segar ke perusahaan menjadi penyebab utamanya. "Kalau dihitung-hitung, dalam 1 tahun kami hanya bekerja selama 6 bulan saja", ujar perempuan asal Sinjai ini. Hal ini belum termasuk jika buruh yang bersangkutan sakit atau terlambat datang ke pabrik. "Perusahaan akan menyuruh kami pulang jika terlambat masuk, kalau tidak masuk kerja berarti tidak ada uang", sambungnya.

Jika sedang beruntung, seperti jika menjelang hari raya dan pabrik sedang beroperasi, Fatma dan buruh lain biasanya mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 50.000. Tapi kejadian ini langka. "Selama bekerja di sini, seingatku baru 2 kali saya dapat THR", ujarnya. Seringkali hari raya bertepatan saat pabrik tidak beroperasi, jika begitu sebagai buruh lepas, tidak bekerja berarti tak dapat THR.

Dalam 18 tahun bekerja itu, upah yang diperoleh hanya mengalami kenaikan kecil. Situasi ini menyulitkan bagi Fatma bersama suaminya yang hanya berprofesi sebagai tukang ojek. Karenanya ia mesti rajin berhemat dan terus bekerja keras mengingat makin tingginya biaya hidup. Apalagi anak mereka satu-satunya kini sudah SMU di sebuah sekolah negeri di Makassar. Kata Fatma, "makin tinggi jenjang pendidikannya, biayanya pun makin besar."

Kondisi hidup yang menghimpit menambah beban yang dipikulnyanya berlipat ganda, "Saya tetap memasak, membersihkan rumah dan pekerjaan rumah tangga seperti biasa," katanya sebagaimana perempuan berkeluarga pada umumnya. Ia harus melakoni itu, karena mustahil menggaji orang lain untuk melakukan pekerjaan rumah saat ia dan suaminya bekerja.

Fatma bisa saja memilih untuk berhenti dari perusahaan tempatnya bekerja sekarang. Namun dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas, ia tak memiliki banyak pilihan selain terus bekerja sebagai buruh lepas tanpa ikatan, tanpa jaminan kesejahteraan, bahkan mungkin tanpa masa depan. Entah sampai kapan.

Dari Bilik Yang Sejuk

Romi Yulianto, 30 tahun, punya kisah lain. Dari bilik yang sejuk oleh hembusan pendingin ruangan, ia mencurahkan waktunya 8 jam sehari sebagai staf Admin Kredit di Panin Bank Cabang Makassar. Dengan pekerjaan itu, Romi harus mengulik setumpuk arsip dan dokumen yang berisi informasi tentang kredit nasabah. Sehari-harinya, alumni STIEM Mappaodang, Makassar ini harus memastikan berkas-berkas nasabah lengkap agar kredit bisa kucur. Ia mesti memeriksa satu persatu, memastikan valid tidaknya berkas-berkas tersebut, mengecek legalitas dokumen, lalu menerbitkan klarifikasi untuk segera diproses pencairannya.

Romi selalu menekankan tentang konsentrasi kerja sebagai modal utamanya dalam beraktifitas. Karenanya, ia dituntut untuk senantiasa bugar dan sehat agar pekerjaannya bisa lancar tanpa kendala. Memenuhi itu, Romi memilih jogging dan fitness. Ia bergabung dengan salah satu klub kebugaran *(gym)* yang ia sambangi 4 hingga 5 kali seminggu, malam hari sepulang kerja.

"Konsentrasi kerja pasti bagus jika dalam keadaan bugar," katanya.

Tetapi bekerja di sektor perbankan tidak selalu seperti gambaran kebanyakan orang, terlebih hanya karena alasan berada di ruangan ber-AC, atau berpenampilan rapi dan menarik. Kerja adalah urusan menghasilkan nilai bagi perusahaan dan pemilik modal. Dan karenanya, perusahaan berkonsentrasi tentang efisiensi dan memaksimalkan laba.

Bisa jadi karena itu, di lain masa Romi merasa beban kerja kadang overload. "Dulu waktu masih di back office harus rangkap-rangkap. Bagian tabungan, deposito, giro, clearing, payment point itu semua rangkap. Jadi banyak menyita waktu," ungkapnya.

Dengan seksama ia menjelaskan mengenai target clearing yang harus dicapai pekerja. Setiap harinya, clearing sudah harus dikirim ke Bank Indonesia sebelum jam 10. Untuk memproses tersebut, pekerja hanya diberi waktu 2 jam untuk memproses hingga 1000 hingga 1500 warkat.Tentu ini merupakan pekerjaan yang menguras tenaga, pikiran, dan kondisi psikologis.

Toh nyatanya, Romi betah dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Ia kini berstatus pegawai tetap. Sesuai aturan perusahaan, ia akan pensiun di usia 55. Sekarang Romi hanya mesti berkonsentrasi pada pekerjaan dan perbaikan karir. Jaminan hari tua menurutnya sudah cukup, karena "kalau dapat pensiun, cukuplah sebagai modal untuk buka usaha."

Ia tidak menuntut macam-macam, karena perusahaan sudah banyak memenuhi permintaan para pekerja. "Kita minta training, dikasih. Minta kursus bahasa Mandarin dan Inggris, dikasih. Fasilitas *aerobic*, futsal, bahkan bikin band saja dikasih. Apalagi yang kurang?"

Alasan-alasan itulah yang membuat Romi dan banyak pekerja lainnya betah. Dalam industri seperti perbankan, kondisi mental dan psikis serta pengetahuan pekerjanya adalah aset perusahaan. Harus dirawat biar moncleng dan terus menguntungkan.

Tentulah sebagai konsekuensi, pekerja harus menyerahkan sepertiga waktu dalam hidupnya setiap hari di kantor. Sepertiganya lagi dipakai beristirahat dan memulihkan tenaga, serta membugarkan diri agar tetap produktif. Jika seluruh pekerja tidak bugar dan produktif seperti Romi, mustahil tahun 2011 lalu perusahaan tempatnya bekerja bisa membukukan keuntungan bersih hingga Rp 2,053 trilyun!

Penyangga Dunia

Fatma dan Romi mewakili kelompok sosial yang sehari-harinya menjual tenaga, waktu dan pikiran demi upah. Bahasa modern punya satu kosakata untuk mendeskripsikan aktifitas ini : kerja! Ini merupakan sesuatu yang khas dalam kapitalisme.

Karena aktifitas dan kondisinya tersebut, mereka dikelompokkan secara sosial sebagai pekerja, atau golongan yang hanya memiliki tenaga untuk dijual agar bisa bertahan hidup. Dalam kapitalisme, pada dasarnya terdapat dua kelompok sosial yang saling berseberangan. Selain pekerja, golongan lainnya adalah mereka yang memiliki modal sehingga leluasa melakukan bisnis untuk melipatgandakan kekayaannya, yakni kelas atas atau borjuasi.

Menurut statistik resmi jumlah pekerja di Indonesia mencapai 117,4 juta jiwa (BPS RI, 2011). Ini merupakan jumlah yang sangat besar yang menempatkannya sebagai mayoritas di dalam masyarakat.

Semestinya, lagi-lagi menurut teori, dengan jumlah yang sangat besar itu para pekerja memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hidupnya, melakukan perlawanan atas kondisi yang morat-marit, lalu menatanya ke arah yang layak, dan bukannya mempertahankan kehidupannya seperti saat ini.

Tapi toh nyatanya tidak. Kehidupan tidaklah sesimpel dunia teori dan seklise cerita sinetron di televisi atau novel-novel pop. Ia begitu kompleks. Mayoritas kaum pekerja justru diam dan seolah-olah pasrah. Mengapa?

Orang-orang ini tidaklah diam. Hanya sebenarnya, mereka tidak memiliki bayangan akan kehidupan lain dari saat ini. Dunia yang lain dari dunia seperti ini. Kadangkala saat mereka mengetahui akan hal itu, juga akan muncul rasa pesimis bahwa dunia yang berbeda dari perbudakan modern saat sekarang itu mungkin.

Bahkan parahnya, banyak di antara pekerja tidak menyadari bahwa aktifitas yang dilakoninya sehari-hari yaitu kerja, merupakan penghisapan. Dengan kata lain, mereka tidak menyangka bahwa dirinya sementara dieksploitasi oleh majikannya. Maka mereka akan sukacita, bangga, dan termotivasi untuk melipatgandakan produktifitasnya. Bukankah produktifitas dan loyalitas mereka akan mendongkrak karirnya? Itulah cara pemilik modal mengkompetisikan pekerjanya, agar masing-masing terdorong untuk bekerja lebih giat dan lebih giat lagi.

Sadar Diri, Sadar Akan Kelasnya

Dengan tidak menyadari berada dalam posisi terhisap atau tereksploitasi, orang-orang tidak punya kebutuhan untuk memperbaiki kehidupannya. Mereka terlena dengan dunia saat ini, yang dianggap sebagai takdir yang tidak bisa dirubah, atau jalan hidup yang sudah digariskan.

Kebanyakan juga menganggap bahwa dunia ini normal, tidak ada sesuatu yang salah. Kita hanya perlu bekerja lebih keras agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Karenanya, mereka tidak punya kebutuhan untuk merubah hidupnya dan dunia.

Kesadaran ini palsu. Ia dibentuk dengan sengaja oleh tatanan untuk mempertahankan dunia agar tetap begini-begini saja –oleh sekolah, media massa, lingkungan pergaulan, institusi sosial, nilai-nilai dan kepercayaan, serta hal-hal lain.

Meski benar bahwa sudah makin banyak orang yang terlibat dalam pergerakan untuk menyulut perubahan, tetap saja jumlahnya masih sebagian kecil dari keseluruhan masyarakat yang ada. Padahal sebuah perombakan total atas dunia, mensyaratkan keterlibatan mayoritas masyarakat.

Keterlibatan tersebut hanya dimungkinkan saat mereka menyadari posisinya dalam sebuah kelas sosial, menyadari bahwa kehidupannya sungguh kejam dan tidak masuk akal. Mereka memiliki kesadaran akan situasi yang membentuk dan memaksanya untuk melakoni semua itu, serta memiliki keinginan yang berkebalikan dari apa yang telah dijalaninya.

Biasanya hal ini dipandang sebagai kesadaran kelas, yakni kesadaran bahwa kelas-kelas dalam masyarakat itu ada atau eksis, disertai pemahaman tentang mengapa kelas-kelas itu muncul. Kesadaran tersebut juga mesti melibatkan keinginan untuk menghapuskan kelas. Itulah 'kesadaran kelas'.

Dengan kesadaran ini, kita dapat membangun aksi bersama dengan sesama, untuk mewujudkan apa yang kita pikir terbaik untuk seluruh orang. Agar kelak tidak akan ada lagi yang balik bertanya, "Apa lagi yang kurang?"

[Tim Liputan : Ishmael Yahalah & Burhan May Lee]

WAWANCARA DENGAN DG RIMANG, AKTIVIS RAKYAT MISKIN KOTA

"Sampai Kapan ki Mau Dipattolo-toloi ?"



Hampir segala hal telah dimonopoli oleh segelintir pihak yang memiliki kekuasaan dan modal. Negara, pemerintah, elite politik, korporasi asing maupun domestik, adalah pihak-pihak yang senantiasa melakukan penghisapan massal. Sebagian besar dari kita tetap dininabobokan oleh sistem yang mereka jalankan. Lebih parahnya, terkadang harus pula menjadi roda penggerak yang memperkokoh sistem busuk tersebut. Tanpa menyadari kita harus merebut kembali hak-hak dasar hidup yang sudah direnggut oleh mereka yang memiliki kuasa dan modal. Hak untuk tidak tercekik oleh kelaparan, hak memiliki tempat tinggal tanpa teror penggusuran, Hak untuk bebas dari rutinitas kerja upahan yang hasilnya digunakan untuk membeli kembali kehidupan ini. Hak untuk tidak terkontrol.

Tak sedikit kalangan yang hanya bisa mengeluhkan dan mengutuk tatkala jalan-jalan tempat mereka setiap hari berlalu lalang untuk beraktivitas, tiba-tiba saja menjadi hiruk-pikuk, macet dan meriah dengan pesta pengrusakan fasilitas umum disana-sana. Merasa mereka bukanlah bagian dari sistem penghisapan yang sedang berjalan.

Di tengah autisme massa itu, masih ada suara-suara dari yang tetap menundukkan kepala tanda penghargaan kepada mereka yang menolak untuk patuh, kepada mereka yang menolak untuk terus tertindas, kepada mereka yang memilih menyesaki jalan-jalan dan meneriakkan protes. Berikut sedikit ulasan perbincangan Serum dengan Dg. Rimang, salah seorang ibu rumah tangga di kawasan Maccini Sombala, Makassar yang juga aktif di Komite Perjuangan Rakyat Miskin Makassar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai unjuk rasa-unjuk rasa yang berlangsung beberapa waktu lalu, khususnya terkait dengan Isu kenaikan Bahan Bakar Minyak?

Tidak salah ji. Sebab, BBM naik efeknya bukan pemerintah maupun pejabat publik yang merasakan. Mereka ongkang-ongkang kaki saja. Kita-kita mi ini, rakyat miskin yang akan menjadi korbannya.

Lalu bagaimana tanggapan Ibu tentang unjuk rasa tersebut, yang berlangsung ricuh dan banyak merusak fasilitas umum?

Unjuk rasa apapun, mau karena BBM, penggusuran atau apapun, selalu ada kemungkinan untuk terjadi kericuhan. Itu tergantung kondisi di lapangan. Secara pribadi, saya maupun organisasi saya setiap kali turun berdemonstrasi selalu mengusung aksi damai, kami tidak ingin mengganggu orang lain.

Tapi, kericuhan yang terjadi di lapangan tidak selamanya merupakan kesalahan dari demonstran. Sering kali hal tersebut disebabkan oleh provokasi aparat. Mereka juga sering membatas-batasi kita untuk merangsek ke area yang dianggap penting oleh demonstran sehingga memicu terjadinya saling dorong. Biasanya kalau demonstran sudah mulai mengganas, mereka mulai menyerang. Bayangkan kalau aparat menyerang dengan pentungan, menginjak-injak, bagaimana kita mau tinggal diam? Mereka seharusnya lindungi kepentingan ta' ini malah dia yang serangki. Jadi wajar ji kalo bentrok. Bahkan kalo perlu berkelahi dengan aparat pun tidak masalah apalagi jika yang diperjuangkan sudah menyangkut kebutuhan hidup, tempat tinggal atau isi perut.

Pengalaman ibu ketika berhadapan dengan keberingasan aparat saat melangsungkan protes?

Tahun 2004 pada saat mengikuti protes penggusuran di Surabaya, saya sudah lupa tepatnya kapan, kami mencoba meringsek masuk ke gedung DPRD Provinsi untuk melakukan pendudukan, tapi aparat menghalangi dan menyerang massa yang mau bertahan. Saat itu saya terkena tendangan sampai terjerembab ke trotoar jalan. Pernah juga kami berkejar-kejaran dengan polisi saat unjuk rasa anti … apa lagi itu namanya? BHP ya? Tahun 2007 kalau tidak salah, saya sudah tidak ingat.

Kita berencana menduduki DPRD Provinsi, sampai sudah mau-masak-masak pula disana, tapi karena dianggap mengganggu ketetiban, jadimi bentrok… Kita kejar-kejaran, sampai harus masuk ke di kampus UMI, kelaparan sampai tengah malam.

Jadi, ibu setuju untuk melakukan perlawanan, dengan berbagai cara, misalnya dengan protes ke jalan?

Seperti ini menurutku, pada dasarnya orang-orang melakukan protes karena ada ketidakadilan, khususnya untuk rakyat miskin seperti kami. Kalo misalnya pejabat yang ko pilih sendiri, orang-orang kaya, justru berbuat kecurangan, maka harusko lawanki!.

Kalo misalnya pemerintah menaikkan harga BBM, sekarang atau kapan saja, tunggumi saja kami mengamuk, bukan kita' yang gunakan BBM, tapi kita' nasusai'. Harga-harga barang naik semua.

Saat unjuk rasa anti kenaikan BBM beberapa waktu lalu berlangsung, banyak pihak termasuk ibu-ibu rumah tangga yang menghujat dan mengeluhkan demonstran yang memblokade jalan dan menimbulkan kemacetan. Bagaimana Ibu menanggapi hal itu?

Ini juga bikinka' heran. Bagi orang yang mapan mereka bisa berkata begitu karena mereka mungkin tidak merasakan langsung, bagaimana susahnya kelaparan saat warga miskin tidak lagi mampu membeli kebutuhan pokok karena harganya yang melambung tinggi. Mereka mungkin juga tidak pernah merasakan bagaimana teror ketika tempat tinggal terancam digusur tanpa kompensasi. Mereka terbiasa hidup enak. Kalau tidak bisa berempati dan berbuat apa-apa setidaknya tidak usah menjelek-jelekkan.

Tapi kalo yang ekonominya juga pas-pasan, tidak ada pikirannya itu kah? Mereka juga pasti kena susahnya. Mereka juga pasti punya kebutuhan, belum lagi kalo ada anaknya sekolah. Baru ngomel-ngomelji na kerja tinggal menonton? Edede, bodo-bodo.

Dalam lingkungan Ibu sendiri, hal-hal apa saja yang terasa begitu membebani kehidupan rakyat dan harus diperjuangkan?

Hak atas ruang hidup. Di lingkungan tempat tinggalku, kita masyarakat miskin berjuang agar bisa memiliki sertifikat tanah, terutama yang sudah tinggal lebih dari 25 tahun. Tapi sayangnya masih seringki' dipersulit oleh pejabat pemerintahan setempat.

Anu juga, masih sering terjadi kecurangan, khususnya dalam hal penyaluran bantuan beras miskin. banyak kartu raskin waga yang tiba-tiba hilang, atau mereka tercatat pindah, padahal tidak. Hal ini yang saya dan beberapa warga lainnya sedang dituntut kejelasannya.

Menurut Ibu, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering kali justru malah semakin menyengsarakan?

Nassami harusko melawan, biar mami sampai baku pukul, atau ditangkap polisi. Sampai kapan ki mau dipattolo-toloi (diperdaya)? Nda perlu ji juga tunggu orang lain pi komando ki. Kita demo karena kita juga termasuk korban. Kalo sekedar mau tampil, mau dibilang peduli, berhentiko saja.

[Wawancara oleh : Isse]

PELAJARAN DARI PEMOGOKAN BURUH PT. FREEPORT INDONESIA

Kerjanya Sama, Upahnya Juga Mesti Sama !



Bulan September hingga Desember 2011 lalu sebuah pemogokan besar terjadi di perusahaan tambang emas terbesar di dunia PT. Freeport Indonesia. Ini adalah peristiwa yang bersejarah, selain karena 12.000 pekerja, pemogokan juga berlangsung hingga hampir 3 bulan. Tingginya tekanan dan represi kepada buruh membuat bentrokan tidak terhindarkan serta menyebabkan 2 orang tewas dalam kejadian ini.

Bagi kebanyakan orang, sekilas tuntutan buruh Freeport ini terlalu mementingkan diri sendiri, tidak pantas didukung. Betapa tidak, dengan upah terendah Rp. 3.316.00,- per bulan (2010), ditambah fasilitas dan tunjangan lain, jumlah ini cukup untuk membuat buruh yang lain 'iri'. Belum lagi di level

Sepintas para pekerja perusahaan tambang ini berkecukupan. Ditambah lagi citra 'anak manis', yaitu karena posisinya yang aman, berkecukupan, dan prestisius membuat buruh Freeport tidak rewel dan neko-neko seperti kawan-kawannya di Jakarta, Surabaya, Tangerang dan tempat-tempat lainnya. Sangat jarang diberitakan kekisruhan dan sengketa antara buruh dan manajemen. Selain dikarenakan peranan humas perusahaan yang agresif, dan fungsi serikat buruh dalam meredam keinginan buruh, pada akhirnya membuat buruh sangat jarang terdengar protes.

Munculnya pemogokan yang diawali dengan perundingan demi perundingan jelas merupakan hal yang mengejutkan. Apalagi pada akhirnya pemogokan ini melibatkan banyak pihak seperti kementerian tenaga kerja, kedutaan besar Amerika Serikat, hingga kepolisian dan militer Indonesia, yang pada akhirnya menghasilkan bentrokan keras yang memakan korban jiwa.

Tentu bahwa kebangkitan buruh Freeport jelas adalah sebuah perkembangan menggembirakan bagi perjuangan kelas.

Salah satu hal menonjol dari aksi mogok buruh Freeport adalah bahwa tuntutan buruh bukanlah sekedar tuntutan sederhana dan normatif tentang kenaikan upah yang seringkali terdengar dalam aksi-aksi buruh lainnya di berbagai daerah. Tuntutan tersebut justru mengekspresikan aspek yang sangat mendasar : bahwa setiap pekerjaan yang sama juga mesti mendapat upah yang sama!

Menuntut upah yang sama atas pekerjaan yang sama merupakan sebuah hal penting. Dalam kapitalisme, kerja-lah yang melahirkan nilai sebuah hasil produksi. Buruh menuntut pengupahan yang sama dengan buruh tambang di belahan dunia lain, yakni $ 7,5/jam atau Rp 78 juta per bulan. Meskipun upah pokok yang didapatkan buruh sekarang ini termasuk tinggi dalam standar hidup Indonesia, namun buruh Freeport di Indonesia sesungguhnya tidak mendapatkan sesuai standar pertambangan dunia. Ini berarti Freeport melakukan perampasan kerja-kerja buruh selama bertahun-tahun.

Dengan nilai tersebut, buruh Freeport Indonesia menuntut kenaikan sebesar 500%! Ini adalah nilai yang terdengar fantastis, karena selama ini standar upah dinilai cukup meskipun perusahaan tempat kita bekerja menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat dan meskipun upah yang sama di negara lain jauh lebih tinggi.

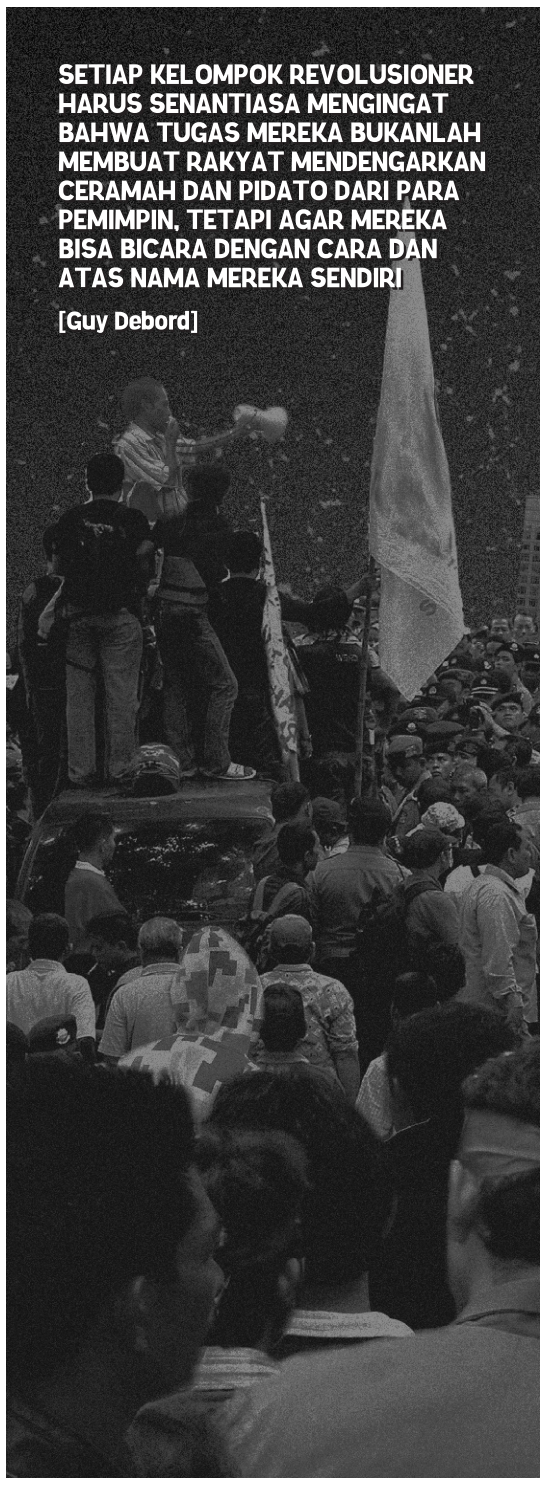
Tetapi tentu saja tuntutan tersebut bukanlah hal yang tidak masuk akal.

Tuntutan ini tentu saja sangat ditakuti oleh kapitalis lainnya. Selama masa pemogokan dilaporkan terjadi lobi dari perusahaan-perusahaan besar seperti Newmount, INCO, dan Unilever yang mendesak agar pihak Freeport menolak tuntutan buruh. Perusahaan-perusahaan tersebut khawatir pemogokan dan tuntutan ini bisa menginspirasi pekerja di perusahaan lain untuk melakukan mogok dan menuntut hal yang sama : pekerjaan yang sama harus diupah sama!

Karenanya tuntutan-tuntutan normatif buruh harus merefleksikan aspek kesamaan pengupahan, sehingga dapat merubahnya sebagai serangan bagi kapitalisme. Buruh industri garmen harus menuntut sesuai standar pekerja garmen dunia, begitu pula karyawan di kantor asuransi atau para *cleaning service*. Ini karena mereka sama-sama mengerjakan pekerjaan yang serupa.

Tingginya tuntutan bukan berarti mustahil. Para pekerja justru harus realistis dengan situasi dunia. Karenanya harus menuntut yang sering disebut mustahil itu!

[Ishmael]



Membela Aksi Protes

Siapa sebenarnya yang dirugikan dari aksi-aksi protes dan kerusuhan? Pemrotes atau pengusaha?



Tahun 2012 di Indonesia diawali dengan serangkaian protes yang terjadi di beberapa daerah dengan latarbelakang persoalan sosial. Di bulan Januari, ratusan ribu masyarakat Bima melakukan protes atas rencana masuknya perusahaan tambang yang mengancam lingkungan dan kehidupan mereka. Aksi protes dilakukan dengan menduduki pelabuhan Bima dan pembakaran kantor Bupati. Di Tangerang dan Bekasi, ratusan ribu buruh melakukan pemblokiran jalan tol untuk menuntut Bupati segera menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tidak lagi mencukupi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di bulan Maret, serentak di berbagai daerah melakukan protes atas rencana kenaikan BBM. Di Makassar, aksi tersebut berlangsung panas oleh tindakan protes yang dilakukan dengan pengrusakan properti (pembakaran mobil, pengrusakan properti restoran siap saji) serta mengambil alih distribusi bahan bakar (BBM dan gas Elpiji) kepada masyarakat sekitar.

Tentu sebagaian besar masyarakat masih mengingat peristiwa-peristiwa tersebut, yang dalam sajian media menjadi berita utama dan berulangkali ditayangkan. Tetapi sedemikian tajam kejadian ini terekspos, sangat banyak bias yang mengaburkan pesan mendasar dari tindakan-tindakan protes bahkan seringkali media membumbui pemberitaan dengan opini-opini yang justru memposisikan gerakan protes sebagai pihak antagonis. Media massa memang memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengarahkan kepercayaan dan opini masyarakat. Tentu, karena media massa sejak dulu telah menjadi corong utama arus informasi publik. Merujuk pada kaidah etika jurnalistik, pemberitaan-pemberitaan pada media massa "konon" harus berimbang, objektif, faktual dan tidak membesar-besarkan. Kenyataannya justru sebaliknya, keberimbangan berita pada media masa kini tinggal mitos.

Lalu apa yang media massa lakukan dari bentuk-bentuk protes tersebut? Tak lain hanya mengabarkan mengenai tindakan-tindakan brutal para tukang protes beserta kerusakan-kerusakan fisik yang diakibatkannya. Media massa tidak hanya memiliki kemampuan sekedar menginformasikan tentang suatu isu tertentu, namun juga menekankan suatu peristiwa itu sehingga akan dianggap penting oleh masyarakat dengan cara memblow up suatu peristiwa tersebut secara massif dan berulang-ulang, termasuk dalam hal memberitakan aksi protes.

Unjuk rasa atau apapun namanya yang berlangsung ricuh sudah barang tentu menjadi tangkapan segar media massa untuk dijadikan "masakan" berita yang gurih untuk ditonton, didengar dan dibaca oleh khalayak ramai. Dengan judul dan kutipan sedemikian dahsyat, masyarakat digiring untuk membentuk opini tentang protes atau aksi langsung di jalan-jalan yang sering kali menimbulkan kemacetan yang hanya merugikan.

Untuk lebih meyakinkan publik, media sering menggunakan redaksi yang makin menekankan pihak pemrotes sebagai antagonis misalnya penggunaan kata yang mengiringi tindakan protes dengan hal-hal yang sifatnya destruktif, seperti menghancurkan, merusak, dan lain-lain. Sementara itu, aparat diposisikan sebagai pihak penengah yang menertibkan, mengatur dan mengamankan. Pemilihan redaksi sedemikian ini, secara tidak langsung menggiring opini yang menyudutkan gerakan protes tidak lain dari sebuah tindakan pengrusakan. Hal ini makin ditegaskan dengan menambahkan kutipan dari para tokoh berpengaruh atau masyarakat pun turut dimuat. Pendapat yang mencoba membidik simpati masyarakat dan membentuk citra buruk tentang sebuah perlawanan.

Yang luput dari pemberitaan media massa adalah, mengapa ada sebagian orang yang melakukan protes-protes tersebut.

"Saya melakukan aksi karena muak dengan pemerintah yang jelas-jelas tidak pernah berpikir tentang kepentingan rakyat. Menaikkan BBM misalnya, sudah tentu akan merugikan banyak orang. Bayangkan semua barang akan melonjak tinggi harganya. Siapapun pasti akan rasa itu. Dan cara yang paling mungkin dilakukan untuk menolak ini adalah dengan aksi. (Seorang mahasiswa dalam sebuah aksi unjuk rasa di Makassar Maret 2012)

Sudah tentu, ikut serta dalam aksi adalah wujud untuk menyuarakan ketidaksetujuan atas peraturan-peraturan pemerintah yang mencekik kehidupan banyak orang. Protes atau ketidaksetujuan adalah sesuatu yang niscaya terjadi. Dalam kondisi demikian siapapun akan berusaha keluar dan menyelesaikannya, terlebih pada hal- hal yang mendasar atau menyangkut persoalan hidup. Para buruh protes untuk kondisi dan upah yang layak, mahasiwa protes atas biaya pendidikan yang mahal, petani protes saat tanahnya dirampas, masyarakat miskin kota dan pedagang kaki lima protes saat tempat hidup mereka digusur, ibu rumah tangga protes atas naiknya harga dan biaya kesehatan.

Di sisi lain dalam pandangan pemerintah, demonstrasi atau gerakan protes justru hanya dianggap sebagai dinamika dari demokrasi sehingga menjadi sesuatu yang lumrah dan wajar terjadi. Sebagai jalur legal formalnya, ada DPR yang menjadi ruang apsirasi dan bersuara bagi mereka yang menuntut keadilan dan hak.

Faktanya, aksi demontrasi tidak lebih dari sekedar tontonan layaknya parade jalanan, disertai ritual konvoi, orasi membawa aspirasi tetapi pada akhirnya menjamur dan kadaluarsa di ruang-ruang komisi DPR. Hal-hal yang berulang seperti inilah yang memunculkan ketidakpercayaan bahwa perubahan tak bisa lagi diserahkan pada segelintir orang (aparatus pemerintah, birokrasi, dewan rakyat), yang sama sekali tidak peduli pada apa yang terjadi di sekitarnya. Wajar jadinya, gerakan protes menjelma dalam wujud yang berbeda.

Beberapa kelompok mengambil jalan lain, seperti yang tampak pada protes tambang dan anti kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Pendudukan, pembakaran, penutupan jalan, pendistribusikan bahan bakar, pengrusakan properti dan serangkaian taktik bermunculan menjadi bahasa dan wujud langsung ketidaksetujuan - perlawanan terhadap kekuasaan.

Tetapi oleh sajian media massa, gerakan protes tersebut dibuat mengerikan, menutupi pesannya yang mendasar dan menampakkan sebagai sebuah kerusuhan, perang, dan aksi teror. Mereka yang melakukan protes dituduh sebagai biang kerok kekacauan, dan aparat dibenarkan untuk menembaki dan menangkapi para pemrotes dengan tindak kekerasan.

Siapa sebenarnya merugi atas kerusakan dari aksi-aksi demonstrasi?

Tidak cukup mempertontonkan gerakan protes sebagai kerusuhan, media lebih lanjut membumbui dengan opini dengan melansir kerugian yang diakibatkan oleh aksi demontrasi. Seperti potongan berita berikut :

General Manager (GM) Grand Clarion Hotel Makassar Anggiat Sinaga mengungkapkan, pada aksi demo anti kenaikan BBM pihaknya mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp325 juta. Ketua Persatuan Hotel dan Restauran (PHRI) Kota Makassar, Kwandi Salim, menyatakan, demonstrasi tersebut mempengaruhi iklim perekonomian di Kota Makassar. Ini sangat merugikan pengusaha hotel. Ratusan juta rupiah gagal masuk di Makassar," ujarnya.

Angka-angka Rp. 325 juta, memang begitu mencengangkan untuk memerlihatkan dampak demonstrasi beberapa waktu lalu. Kepolisian Republik Indonesia bahkan lebih berani mengklaim kerugian mereka mencapai 5 Milyar selama kurang lebih seminggu unjuk rasa anti kenaikan BBM.

Sorotan mungkin akan tertuju pada angka ratusan jutaan dan milayaran tersebut. Tapi perhatikan secara seksama, siapa sebenarnya yang dirugikan atas perisitiwa aksi demontrasi ini. Jelas, bukan masyarakat, melainkan pengusaha dan sektor bisnis lain. Saat tak terjadi demonstrasi, apakah ratusan juta hingga milyaran rupiah tersebut akan mengalir ke kantong masyarakat miskin? Lalu seberapa penting bagi masyarakat untuk mengkhawatirkan hilangnya nilai-nilai fantastik tersebut. Tidak dapat dipungkiri, terkadang aksi demonstrasi dengan menutup jalan misalnya, akan memberi kerugian bagi segelintir masyarakat, seperti kemacetan yang menghambat aktifitas. Tetapi jika kita menghitungnya secara terbalik, kerugian kecil bagi segelintir masyarakat oleh aksi demonstrasi yang berlangsung sekian hari, akan sangat jauh nilainya dengan waktu kerja dan tenaga yang harus ditambah oleh buruh, supir angkot, tukang bentor, tukang becak, kuli bangunan, nelayan, petani berserta resiko yang harus dihadapi oleh naiknya biaya hidup jika misalnya harga BBM dinaikkan. Beban waktunya terasa lebih panjang.

Tapi bagaimana dengan kerusakan fasilitas publik yang berasal dari anggaran publik?

Kerusakan fasilitas publik adalah opini yang terlalu sering dipakai untuk mempertegas kesan buruk pada gerakan demontrasi. Sederhananya, ini untuk mengatakan aksi protes tidak lebih dari merusaki benda-benda yang berasal dari uang sendiri atau uang masyarakat. Pada protes aksi kenaikan BBM lalu, media memberitakan bahwa kerusakan traffic light paska demontrasi menimbulkan kerugian sebebar 45 juta rupiah.

Kerugian ini terus dibeberkan untuk memperkuat kesan buruk demonstrasi. Tentu saja ini tidak sebanding dengan uang publik yang dihambur-hamburkan negara untuk kepentingan segelentir orang saja. Belum lagi anggaran yang dikorup para pejabat. Bandingkan: 45 juta rupiah dengan Rp. 20 Milyar untuk membeli kursi rapat DPR, dengan Rp 30 milyar untuk membiayai rapat-rapat presiden, Rp 64 milyar untuk membeli mobil dinas mewah pejabat negara, ditambah puluhan miliar yang dikorup pejabat, dan masih banyak lagi yang tidak terungkap. Sepatutnya merekalah yang dicap sebagai perampok.

Dimana seharusnya kita berposisi ?

Uraian diatas adalah gambaran bahwa selama ini pandangan kita, dan sebagian besar masyarakat, tidak lain dari ciplakan media. Sehingga masyarakat yang menjadi korban langsung dari sistem kekuasaan, jauh lebih membela kekuasaan itu sendiri dibanding membela orang-orang yang berani berjuang untuk mendapatkan haknya. Saat kemacetan di jalan oleh aksi demonstrasi, kita berceloteh dan memaki mereka dan menuduhnya macam-macam.

Kita harus tahu, bahwa perubahan adalah buah dari keberanian segelintir orang yang berani bersuara dan memprotes. Di pabrik, para buruh mendapat upah yang layak karena mereka berani untuk menuntut dan mogok, di desa para petani melawan dan berperang dengan korporasi agar tanahnya tetap menghasilkan pangan bagi orang banyak, masyarakat miskin kota berani secara langsung menduduki ruang-ruang tanpa izin untuk mendapatkan tempat hidup. Dimana-dimana kita akan menemui hal serupa.

Di dalam sistem dimana pemerintah dan pengusaha yang berkuasa, maka tidak jaminan bagi kita untuk mendapatkan yang lebih baik kecuali dengan merampas kembali hak-hak yang telah diambil. Lebih jernih dalam memandang dan menilai bahwa aksi demontrasi atau gerakan protes adalah proses untuk berubah untuk menuju pada keadaan yang lebih baik bagaimanapun caranya. Juga dengan mengesampingkan segala kesan dari hipnotis media massa bahwa hal tersebut buruk dan tidak patut.

Jikapun kita belum mampu menjadi bagian langsung dengan merasakan kerasnya perjuangan di jalanan, paling tidak kita bisa memulainya dalam pikiran, "Para pemrotes telah melakukan hal yang benar!"

[Tim Liputan : Isse, Alisa, Haris]

Mencurigai Demokrasi

Ishmael Yahalah

Penundaan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu menunjukkan betapa tidak efektifnya sistem politik yang berlangsung. Yang mengkhawatirkan, itulah model yang umum dikenal di masyarakat tentang bagaimana tatanan sosial dapat dikelola. Dari kondisi ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam rangka membangun tatanan baru yang lebih ideal.

Hal pertama dan terpenting adalah betapa pun tidak sesuai dengan keinginan kita yakni membatalkan rencana kenaikan harga, penundaan tersebut adalah buah keberhasilan dari rangkaian perlawanan dan protes keras yang berlangsung hampir dua pekan tanpa henti. Tanpa tekanan dan protes yang melibatkan banyak orang serta 'kejadian-kejadian tidak biasa' di beberapa tempat, mustahil ada perubahan yang berarti, bahkan bukan tidak mungkin kenaikan BBM sudah kita alami sekarang ini.

Sementara itu ada pelajaran penting lainnya yang senantiasa luput dari perhatian kita yang justru harus dipahami secara mendasar. Bahwa persoalan tentang rencana kenaikan harga bukanlah sekedar skema ekonomi belaka, melainkan juga tentang segelintir orang yang menentukan kehidupan seluruh masyarakat.

Pemaksaan Yang Sah dan Konstitusional

Kita semua tahu, keputusan tentang kenaikan maupun penundaan tidak lahir begitu saja. Ia lahir dari pertimbangan dan hitung-hitungan politik.

Lalu, mengapa kita turun ke jalan dan menyatakan penolakan serta kemarahan kita? Karena rencana dan keinginan itu bukanlah keinginan dan kemauan kita.

Lalu jika bukan kemauan dan keinginan kita, mengapa hal ini tetap terus dipaksakan ? Jawabnya : karena ada yang memaksakan dan lagipula pemaksaan tersebut sah secara hukum dan bersifat konstitusional!

Tentu saja hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan baru : bagaimana bisa sebuah pemaksaan yang berdampak pada kehidupan mayoritas orang di negeri ini dapat disahkan, dilegalkan, dan dijadikan landasan untuk melahirkan aturan-aturan menyengsarakan berikutnya?

Dan kita tahu jawabannya : demokrasi.

Demokrasi Artinya 'Seolah-olah Terwakilkan'

Tidak berarti dengan mencurigai demokrasi berarti menganjurkan kediktatoran. Ini bukanlah cara berfikir yang baik. Tujuan dari argumen ini justru menunjukkan bahwa konsep mapan tentang demokrasi bukanlah sesuatu yang final dan karenanya mesti terus diperiksa.

Benar bahwa hampir seluruh negara di dunia menganut demokrasi sebagai alternatif dari sistem kediktatoran. Demokrasi adalah pandangan bahwa rakyatlah yang semestinya berkuasa, dan karena itu mereka harus memegang kekuasaan yang dijalankannya melalui badan-badan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tujuannya untuk membatasi kekuasaan satu pihak agar tidak bertindak melampaui batas, sebagaimana yang sering terjadi pada sistem pemerintahan otoriter.

Ada berbagai nama dan jenis yang kita kenal seperti demokrasi parlementer ala Eropa, demokrasi terbatas, perwakilan atau demokrasi terpimpin ala Soekarno. Dari sekian banyak perbedaan-perbedaannya, konsep-konsep tersebut memiliki persamaan kunci : bahwa kekuasaan seolah-olah berada di tangan rakyat, tetapi dalam prakteknya sehari-hari, ia dialihkan ke tangan sekelompok orang yang dinamakan 'wakil'. Alih kuasa ini dilakukan secara resmi, sah dan konstitusional. Inilah rahasia dari demokrasi.

Karenanya ajaran inti dari demokrasi adalah mengatasnamakan orang banyak. Konsepnya bahwa pemerintah bisa merencanakan sesuatu tanpa keharusan untuk mempertimbangkan persetujuan dan tawaran masyarakat. Parlemen bisa mengajukan sesuatu, entah undang-undang, interperlasi, dan lainnya, tanpa ada keharusan untuk meminta persetujuan atau penolakan dari yang diwakilinya.

Mereka memang tidak perlu melakukannya karena tidak ada konsekuensi hukum dan politik yang mengaturnya. Dalam demokrasi, sekali kita memilih para wakil, maka selama 5 tahun ke depan wewenang dan haknya hampir-hampir tanpa batas. Mungkin satu-satunya batasan adalah aspek moral, tetapi tentu sangat konyol mempertaruhkan hidup mati kita dengan sesuatu yang sama sekali tidak bisa diikat.

Kembali ke seteru di parlemen tentang menolak dan menyetujui kenaikan harga BBM misalnya, pemerintah tidak harus meminta persetujuan kita terhadap keputusan-keputusan yang akan diambilnya. Bahkan jika kita menolak mati-matian pun, keputusan pemerintah tetap tidak bisa disalahkan sepanjang memenuhi aturan-aturan formal.

Drama Politik

Drama politik BBM menunjukkan bahwa segala keputusan penting yang menyangkut kehidupan kita ditentukan hanya oleh segelintir orang. Hal ini harus dipahami oleh setiap orang bahwa bukan masalah BBM saja yang mendapat perlakuan seperti ini. Masalah-masalah lain seperti korupsi, kemacetan, perusakan lingkungan, upah murah, penembakan rakyat, penggusuran dan sebagainya, muncul dari situasi dimana kehidupan kita dikendalikan oleh segelintir orang.

Tetapi ini bukanlah sekedar jumlah yang segelintir itu, masalah pokoknya adalah kontrol atas kehidupan kita bukan di tangan kita sendiri melainkan ada pada mereka yang 'seolah-olah mewakili kita.'

Sementara itu, kebanyakan orang beranggapan bahwa *error* tidak terletak pada prosedur dan mekanisme melainkan orang-orang atau partai yang duduk di posisi tersebut. Dan sebagai solusinya kita harus memilih orang atau partai yang betul-betul berkomitmen dan berpihak pada rakyat, dan mendudukkan mereka. Dengan mengganti orang dan partai yang berpihak dan punya komitmen, untuk duduk di pemerintahan, parlemen, lembaga hukum, kita dapat terhindar dari ancaman seperti kenaikan harga, impor pangan, pengrusakan lingkungan atau kebebasan pers.

Ada pula pandangan kritis mengatakan bahwa kritik terhadap model ini sesungguhnya adalah kritik terhadap model demokrasi liberal atau demokrasi borjuis, bukan pada model yang lebih ideal dan dianggap sebagai solusi atas kebangkrutan demokrasi borjuis, dan sebagai tawaran demokrasi sesungguhnya atau acapkali disebut sebagai demokrasi kerakyatan.

Benarkah? Baiklah kita uji pendapat itu.

Pada saat kita berhasil menggagalkan keputusan-keputusan penting, seperti kenaikan harga BBM misalnya, sesungguhnya kita tetap tidak bisa beranjak dari posisi : menolak atau menerima keputusan yang direncanakan. Hanya posisi itulah yang kita miliki.

Untuk itu ada tiga hal mendasar yang harus kita periksa, yakni : 1) siapa sesungguhnya yang berkuasa atau memegang kekuasaan? 2) bagaimana kita mengontrol kuasa yang kita miliki, dan 3) bagaimana kita mengakses kekuasaan itu setiap waktu?

Mari kita jawab satu persatu. Tiga poin standar ini mensyaratkan bahwa selama kita masih terwakili dan termediasi oleh pihak lain dalam menentukan keinginan kita, maka tidak akan pernah ada yang namanya kebebasan untuk diri kita–sesuatu yang justru dielu-elukan dalam demokrasi.

Jawaban dari pertanyaan pertama sungguh jelas: bukanlah kita yang memegang kuasa atas diri dan kehidupan kita. Ada segelintir orang di parlemen, di pemerintahan, di perekonomian, di ruang-ruang sosial budaya, yang berkuasa atas nama kita.

Jawaban kedua juga jelas. Kita tidak bisa mengontrol kuasa yang ada pada kita. Kuasa yang ada di tangan kita, yang dipercaya hanya dalam tataran teori saja, diambil paksa oleh konstitusi untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti anggota parlemen, birokrasi pemerintahan, dan lembaga sosial lain.

Sementara untuk pertanyaan terakhir juga sangat terasa bahwa kita tidak bisa senantiasa mengakses kontrol tersebut melainkan hanya momen-momen tertentu, seperti pemilu yang berlangsung 5 tahun sekali. Itu pun hanya sebatas memilih orang atau partai, dan setelahnya membebaskan orang-orang tersebut melakukan 'apa yang mereka anggap benar'.

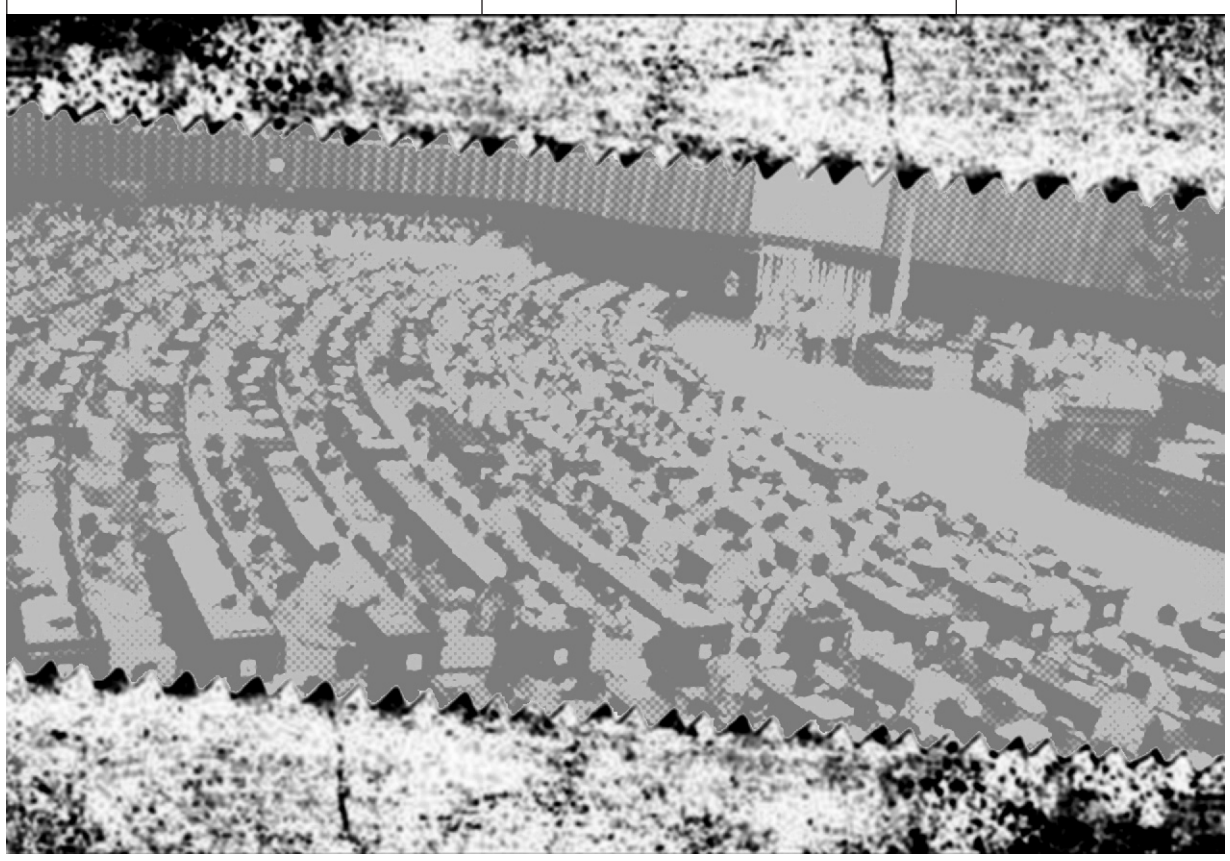
Karenanya untuk betul-betul dapat menentukan nasib dan kehidupan sendiri, kita harus membangun sistem sosial yang juga betul-betul berbeda dari hari ini. Yani sebuah tatanan dimana kekuasaan berada di tangan kita sendiri –bukan segelintir elit, langsung –tidak terwakilkan dan termediasi, dan berada dalam jangkauan kita sehari-hari secara ruang dan waktu.

Demikianlah bahwa keberhasilan menunda kenaikan BBM bukan saja memberikan pelajaran bahwa jika bukan rakyat sendiri yang berupaya maka tidak akan ada yang bisa,tetapi juga bahwa hanya segelintir saja yang menentukan kehidupan mayoritas orang di negeri ini. Dan hal ini akan terus terjadi sepanjang sistem politik melegalkan situasi dimana mayoritas orang hanya bisa mengambil posisi pasif, dan bukan aktif.

Ke depan, agar tidak terjebak dalam liang yang sama, kita harus mulai memperjuangkan dunia lain dari saat ini.

tidak berarti dengan mencurigai demokrasi berarti menganjurkan kediktatoran

sebuah tatanan dimana kekuasaan berada di tangan kita sendiri –bukan segelintir elit; langsung –tidak terwakilkan dan termediasi; dan berada dalam jangkauan kita sehari -hari secara ruang dan waktu



Pindai dan sebar tulisan ini
(scan and share this article)

Penegasan Represi Negara dalam UU PKS

Burhan M. Lee



Berangkat dari pengalaman dalam penanganan konflik sosial yang dianggap tidak berjalan dengan maksimal, pada 11 April 2012 silam DPR-RI mensahkan RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS) menjadi undang-undang untuk memperbaiki hal tersebut. Selama ini, pemerintah dalam menangani konflik sosial mengacu pada beberapa peraturan yang ada. Namun hal ini dipandang menyulitkan pemadaman konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pemerintah membutuhkan satu acuan hukum yang spesik mengatur hal ini. Konflik yang kental dengan isu SARA seperti konfilik Ambon dan Poso, dalam penanganannya dinilai lamban dan tidak maksimal dikarenakan pemerintah kesulitan untuk merumuskan langkah yang tepat karena tidak adanya aturan yang jelas mengatur tentang konflik sosial. Tetapi benarkah alasan utama pembuatan undang-undang ini hanya semata untuk menghadirkan perdamaian dan mencegah konflik? Atau ada hal lain yang lebih esensial dan strategis yang mesti segera diatur untuk kepentingan tertentu?

Konflik Agraria dalam UU PKS

Dalam pasal 1 UU PKS dijelaskan bahwa konflik sosial adalah "benturan dengan kekerasan fisik antara dua atau lebih kelompok masyarakat atau golongan yang mengakibatkan cedera dan/atau jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, berdampak luas, dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menghambat pembangunan nasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat". Defenisi ini jelas sangat luas dan bisa ditafsirkan dengan berbagai pandangan tentang konflik sosial itu sendiri. Hal ini memberikan peluang yang sangat besar bagi pemerintah untuk melakukan penindakan terhadap semua "kekacauan sosial" termasuk di dalamnya konflik agraria yang merupakan konflik horizontal dengan jumlah yang tinggi terjadi di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agriaria mencatat bahwa sepanjang tahun 2011, terjadi 163 konflik agraria dengan jumlah rakyat atau petani yang menjadi korban tewas mencapai 22 orang dan korban luka tembak terdata lebih dari 120 orang yang melibatkan 69.975 kepala keluarga dengan luasan areal konflik mencapai 472.048,44 hektare.

Secara tersurat, undang-undang ini mengatur penanganan konflik mulai dari pencegahan, penanganan dan pemulihan di lokasi yang masyarakatnya tengah berkonflik, dengan kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengerahkan Tentara Nasional (TNI). Hal ini berkaitan nantinya dengan penanganan konflik agraria yang seringkali melibatkan warga (petani dan nelayan) dengan perusahaan atau korporasi. Di tengah konflik seperti ini korporasi selalu menginginkan penyelesaian permasalahan dengan cara yang mudah dan murah untuk menghindari kerugian. Oleh karenanya perusahaan seringkali menjalankan pola yang sama dalam memenangkan sengketa lahan. Hal tersebut dilakukan dengan menyulut konflik horozontal yang mengadu sesama warga agar saling berhadap-hadapan sehingga perusahaan bisa dengan mudah menguasai tanah.

Modus ini dijalankan dengan menyuap elit atau tokoh warga, memberikan ganti rugi tanah pada hanya sebagian warga atau mempekerjakan beberapa warga yang mudah terbujuk iming-imging gaji tinggi, yang pada akhirnya berpihak pada perusahaan. Dalam situasi tertentu, pertarungan fisik antar sesama warga tidak terelakkan dan menelan kerugian harta serta nyawa yang pada akhirnya memuluskan langkah perusahaan untuk menguasai tanah. Dalam kondisi seperti itu konflik agraria kemudian berubah menjadi konflik antar sesama warga dan hal ini dapat menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak dalam rangka meredakannya dan berakhir dengan kemenangan perusahaan atas tanah yang menjadi sengketa.

Represi Terhadap Perjuangan Sosial

Di dalam UU PKS dijelaskan bahwa pemerintah memiliki keleluasaan mengerahkan pasukan nasional yang memiliki kemampuan tempur di atas kemampuan polisi. Undang-undang ini memberikan celah yang lebar untuk menghadirkan represi militeristik yang kental dan sering dipraktekkan kala Suharto berkuasa selama 32 tahun. Negara juga bisa dengan mudah mencap perjuangan sosial masyarakat yang sekedar menuntut hak, atau menginginkan transformasi yang lebih menyeluruh sebagai konflik sosial yang harus dicegah atau dipadamkan. Sebagaimana nilai usang yang sering dikemukakan oleh negara tentang stabilitas, ketentraman dan ketertiban, undang-undang ini mengusung terciptanya hal-hal tersebut guna memacu pembanguan dan pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan kesehahteraan rakyat. Namun kalimat klise seperti ini diajukan untuk mengaburkan kondisi sebenarnya yang terjadi di tingkat masyarakat, dimana perampasan, penghisapan dan pelecehan mendominasi keseharian warga negara. Kondisi aman yang dimaksudkan pemerintah adalah situasi yang kondusif agar perusahaan-perusahaan raksasa bisa merampas tanah rakyat, menghilangkan kemandirian ekonomi rakyat sehingga memaksanya menjadi pekerja upahan.

> **Negara bisa dengan mudah mencap perjuangan sosial masyarakat sebagai konflik sosial yang harus dicegah atau dipadamkan**

Untuk memuluskan titik awal perusahaan untuk melipatgandakan keuntungan, perlu ada perlakuan yang tepat untuk mencegah perlawanan muncul dan menyebar. Jika usaha-usaha persuasif pemerintah yang seringkali mengerahkan agen-agen pemoderanan masyarakat melalui NGO tersebut gagal, pengerahan aparat militer selalu menjadi pilihan untuk menekan warga dengan dalih pengamanan dan penstabilan kondisi. Hal ini semakin mudah dilakukan dengan desentralisasi kekuasaan dalam menetapkan kondisi sebuah wilayah sedang dalam "konflik sosial" yang diatur dalam undang-undang ini. Faktanya, pemerintah daerah seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah kini menjadi centeng lokal yang dengan setia melayani kepentingan perusahaan. Di Morowali, Bima, Mesuji, Takalar dan Semunying membuktikan bahwa pemerintah menjadi aktor penting untuk memuluskan rencana operasi perusahaan tambang dan perkebunan, yang dengan mudah memberikan perizinan tanpa perlu memberi tahu masyakatnya, bahkan menjadi garda depan yang menekan warga untuk tidak macam-macam. Melihat hal ini, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa undang-undang ini makin menegaskan kekuasaan pemerintah daerah yang sedari awal mempunyai tanggung jawab melemahkan setiap individu yang dinaunginya, menyebarkan mental inferior, merepresi individu dengan hukum dan aparat penegaknya, sehingga lebih mudah dikontrol dan perlakukan seenaknya.

Pada kasus konflik sosial yang setidaknya dipermukaan diberitakan sebagai konflik SARA, kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah peradaban manusia dimana konflik seperti ini memiliki bentuk penyelesaian masing-masing sesuai dengan kebudayaan di tiap lokasi konflik. Masyakat yang tidak mengenal sistem pemerintahan formal selalu bisa menemukan keseimbangan di dalam lingkup mereka, meskipun perang seringkali tidak terelakkan. Terkait dengan hal tersebut, di dalam undang-undang ini juga mengatur pranata adat dan komisi penyelesaian konfilik (KPKS) sebagia lembaga khusus yang mengusahakan proses perdamaian dan rekonsiliasi di antara warga yang berkonflik.

Dalam usaha untuk menangani konflik jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit, belum lagi jika eksalasi konflik yang terlanjur membesar. Untuk menjawab ketidakberdayaan negara dalam penyelesaian konflik, negara melalui undang-undang ini bisa memberdayakan agen-agen lokal untuk menyelesaikannya. Mekanisme musyawarah yang mengakar di dalam budaya masyarakat diambil alih dan dilembagakan oleh negara demi kepentingan stabilitas. Dengan diambil-alihnya forum-forum musyawarah warga oleh negara, kemarahan bisa dengan mudah mereda. Di dalam pranata adat maupun KPKS, unsur negara sangatlah dominan di dalamnya, sehingga dalam proses dialog yang dilakukan akan menghindari penyelesaian akar masalah dan mendorong agar masyarakat untuk tetap tunduk pada aturan hukum yang diberlakukan oleh negara. Dalam keadaan tertentu cara ini mudah dan murah untuk memadamkan api.

Mengingat semua aturan dan perundang-undangan dibuat oleh segelintir orang yang punya posisi istimewa dan kepentingan terhadap hidup kita, maka kita mesti waspada. Dominasi mereka yang berjumlah secuil terhadap hidup orang yang sangat banyak harus dihentikan. Jangan menunggu, mulailah dari sekarang!

Pindai dan sebar tulisan ini
(scan and share this article)

DARI WUKAN, CHINA HINGGA QUEBEC, KANADA

Seluruh Dunia Bergolak



Gerakan hari ini mencerminkan seluruh potensi perlawanan rakyat. Dunia sedang terguncang oleh krisis. Krisis kemanusiaan yang direbut oleh Negara dan pemilik modal. Krisis yang membawa dunia menuju sebuah perlawanan tanpa kompromi untuk berjuang mengambil alih hidup kita yang telah dirampas.

2012 menjadi tahun yang penuh dengan letupan-letupan amarah dari seluruh penjuru dunia. 2012 menjadi peluang untuk mengajukan kembali dan mendefinisikan ulang konsepsi dari perjuangan anti-otoritarian, melihatnya dari lensa aksi langsung dan segala nuansa yang melingkupinya, bukan dari kulit luar dan pandangan reformis tua yang tidak hanya kadaluarsa tapi juga berlawanan dengan niat untuk melawan dan merebut kembali hidup yang dirampas oleh Negara dan pemilik modal. Bukan hidup yang telah dirusak oleh uang dan konsumsi, tapi justru hidup yang tidak memiliki batasan dan hukum.

Polandia sebagai salah satu tempat pelaksanaan ajang perhelatan sepakbola EURO 2012 pada bulan Juni-Juli tahun ini ternyata menjadi momok yang mengerikan bagi wanita-wanita Polandia. Dibalik kemegahan stadion, tersimpan dendam kaum wanita (orang tua, guru, dan anak-anak) yang harus menanggung krisis keuangan negara karena tempat mereka bekerja (institusi publik dan lembaga pendidikan) mengalami privatisasi dan pemotongan anggaran oleh pemerintah Polandia. Anggarannya digeser untuk membiayai euro 2012. Dampaknya, sekolah dan taman kanak-kanak harus tutup atau meningkatkan pembayaran untuk tetap bertahan di tengah krisis, biaya hidup meningkat, dan rumah sakit diprivatisasi. Pembangunan stadion bola untuk persiapan EURO saja, harus digantikan dengan hilangnya 6000 taman bermain, sekolah, pusat budaya dan taman kanak-kanak. Menghabiskan jutaan euro hanya untuk kejuaraan sepak bola bergengsi dan memotong subsidi untuk kebutuhan dasar masyarakat bukanlah hal yang bisa ditolerir. Pembangunan stadion yang megah justru membunuh kehidupan rakyat Polandia. Tanggal 2 April mereka menduduki bangunan sekolah dan rumah sakit untuk mengekspresikan kemarahan sebagai bentuk ancaman terhadap pemerintah Polandia dan pemilik modal yang merampas kehidupan mereka. Selain itu, mereka juga merencanakan akan melakukan mogok kerja dan protes sepanjang jalannya pentas EURO 2012.

Afrika Selatan, tambang platina terbesar di dunia, Impala Platinum's Rustenberg, para buruh melakukan mogok kerja dan pengrusakan property perusahaan. Mereka meminta perusahaan menaikkan gaji buruh yang tidak sesuai dengan resiko pekerjaan yang mereka jalani sebesar 300% dari upah sebelumnya. Aksi mogok kerja, vandalism dan konfrontasi dengan polisi ini berlangsung selama 6 minggu yang berujung dengan PHK 17.000 buruh dan 1 buruh meninggal pada 1 Februari. Mengusung tuntutan yang sama, ribuan orang yang terdiri dari pekerja The Royal Alexandra (Rumah Sakit) dan University of Alberta Hospital di Kanada melakukan mogok kerja pada 16 Februari.

Tuntutan lain datang dari sisi pendidikan. Sejak Februari mahasiswa di quebec university, montreal, melakukan pemogokan umum. Ini bukan hanya mengenai kenaikan biaya kuliah. Tapi melampaui hal tersebut, untuk menolak segala hal yang tidak mereka setujui dan menyebarluaskan protes ke seluruh dunia bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Para mahasiswa ini juga melakukan pendudukan dan vandalisme di sekitar kampus untuk mempertegas posisi mereka menolak privatisasi pendidikan. Kemarahan para mahasiswa ini berawal dari privatisasi kampus dan penjualan sumber daya dari universitas quebec yang akan dijadikan galian tambang dan sumber produksi energy.

Bertolak ke inggris, guru-guru yang tergabung dalam serikat guru di Birmingham melakukan mogok kerja karena sekolah tempat mereka mengajar akan diprivatisasi/menjadi swasta pada 9 mei. Sekarang sudah terdapat lebih dari 1700 sekolah yang telah diprivatisasi, setelah sebelumnya pada tahun 2010 hanya 300 sekolah. pemogokan di Birmingham menjadi tameng terakhir bagi nasib pendidikan di inggris setelah wilayah lain selain Birmingham sepakat untuk memprivatisasi sekolah mereka.

Tanggal 17 Mei, pelajar dan staf (buruh pengangkat barang, staf keamanan, dan staf penyedia makanan/katering) Sussex University yang juga berada di Inggris melakukan pemogokan dan pendudukan gedung perpustakaan sejak Desember 2011 sebagai bentuk protes terhadap privatisasi jasa universitas yang akan mengalihkan status pekerja menjadi *outsourcing*. Alasannya profesionalisme dan spesialisasi kerja serta mengurangi biaya produksi universitas. Kondisi yang bakal menjerumuskan mereka pada ancaman pemecatan sepihak oleh pihak universitas dan kehilangan gaji pensiun. Alasan bahwa krisis ekonomi global merupakan pemicu pengalihan status kerja inilah yang membuat pelajar dan staf marah. "Sektor publik (pendidikan, rumah sakit, dll) diadakan bukan untuk menyelamatkan negara dari krisis, tapi untuk menyejahterakan kehidupan kami sebagai pihak yang membiayai negara ini!" teriak staf dan pelajar Sussex University.

Antara menyerah atau mati kelaparan! Kisah solidaritas warga Wukan yang berjuang untuk kehidupan mereka. kerusuhan di Cina bermula September tahun lalu. Dipicu oleh perampasan tanah komunal (kebun bersama) oleh pemerintah lokal Wukan untuk dijual kepada sebuah perusahaan konstruksi. Para pemrotes memblokade jalan dan menyerang gedung yang dibangun di atas tanah mereka. 3 orang ditangkap atas kejadian ini. esoknya ribuan warga Wukan mengepung kantor polisi dan meminta pembebasan atas 3 orang teman mereka. Tidak terima atas pengepungan kantornya, polisi dan preman bayaran menyerang warga wukan tanpa pandang buluh. 1 orang warga sipil meninggal akibat kejadian ini. hal ini memancing kemarahan warga Wukan dan kemudian menyerang balik polisi dan partai komunis keluar dari kota. Tapi, masalah warga Wukan belum selesai karena mereka dikepung oleh polisi beberapa mil dari kota. Hingga akhirnya polisi mengepung Wukan dan memblokade seluruh jalan keluar. Hanya ada dua pilihan menyerah atau mati kelaparan. Ditengah keputusasaan, solidaritas menjadi senjata ampuh untuk melawan. Warga sekitar Wukan menyelundupkan makanan dan bahan bakar untuk mereka yang sedang terkepung. Warga wukan berhasil mempertahankan tanah komunal mereka dan yang lebih penting, mempertahankan kehidupan mereka yang nyaris dirampas.

"Kami tidak sedang menunggu mereka memberitahukan saat yang tepat untuk melawan, kondisi yang ideal untuk berjuang. Kami memutuskan untuk berhadapan saat ini di tempat kami masing-masing, sadar akan setiap tindakan yang kami pilih, setiap langkah yang dari sekarang akan menjadi ancaman bagi kekuasaan" kutipan pernyataan warga Wukan yang berada dalam kondisi terkepung.

Potret kejadian yang dimuat di tulisan ini memperlihatkan bahwa kondisi mereka yang melawan di luar sana tak jauh beda dengan kondisi kita. Mereka yang melakukan protes, mogok kerja dan pendudukan bukan manusia super. Mereka hanya punya solidaritas dan hasrat untuk berjuang. Mereka hanya manusia biasa, sama seperti kita yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Mereka terus melawan dan memperjuangkan kehidupan mereka. Lalu mengapa kita tetap saja diam??

[Theo]

Otonomi, Swa-organisasi, Resistensi!

PESAN DARI PERTEMUAN NASIONAL PERJUANGAN OTONOM ANTI-KAPITALIS DI MEKSIKO



Sekira 500 orang berkumpul di Cheran K'eri, Meksiko untuk menghadiri Pertemuan Nasional Perjuangan Otonom Anti-Kapitalis, 24-27 Mei 2012. Mereka berasal dari 11 negara dan 15 kota di Meksiko. Pertemuan ini bertujuan untuk mendengar, mempertemukan, dan berbagi pengalaman serta pengetahuan antar gerakan akar rumput otonom anti-kapitalis tentang metode, cara dan jalur-jalur dalam mengorganisir perlawanan terhadap negara dan kapitalisme. Selain untuk mendukung perjuangan komunitas Cheran, pertemuan ini juga menggali pengalaman berbagi antar kelompok dan perjuangan mengenai otonomi, swa-organisasi, dan jalan hidup yang selaras dengan alam.

Pertemuan ini difasilitasi oleh masyarakat Cheran dan Jaringan Perlawanan Otonom Anti-Kapitalis serta beberapa kelompok akar rumput lainnya. Dalam empat hari, partisipan membangun tenda-tenda di alun-alun kota, untuk menggelar berbagai agenda yang diorganisir secara swakelola. Selain konferensi utama, juga digelar puluhan workshop, pagelaran budaya serta diskusi panel.

Konsolidasi otonom ini diorganisir secara swadaya oleh seluruh kontingen dan delegasi yang berasal dari setidaknya 100 organisasi rakyat akar rumput, termasuk 500 orang partisipan.

Dalam sesi awal yang digelar di pusat kota, forum menghadirkan tiga kelompok yang telah bertahun-tahun berjuang secara gigih melalui swa-organisasi otonom. Yang pertama adalah Brigade Callejera, sebuah organisasi pekerja seks, FPFVI-UNOPI yang fokus mengadvokasi masalah perumahan dan ruang pendidikan serta kebudayaan bagi warga kota, serta Radio Nomndaa, sebuah kelompok yang mengelola stasiun radio dan mendorong pembangunan dewan warga otonom di wilayah Suljaa.

Di hari berikutnya, diskusi mengarah pada persoalan pengelolaan komunitas sehari-hari secara mandiri, seperti keamanan, media, pendidikan, dan partisipasi anggota komunitas. Berbagai pengalaman dan analisa dilontarkan. Gilbert Lopez, seorang antropolog yang ikut mendukung perjuangan komunitas juga mengingatkan semua yang hadir akan penetrasi militer dan polisi terkait keberlangsungan otonomi. Menurutnya, apa yang berlangsung di Cheran telah menunjukkan bagaimana otonomi dapat menjadi sebuah cara untuk melawan kejahatan terorganisir, negara dan kapitalisme. Namun otonomi, kata Lopez, tidaklah selalu sebagai hal positif. "Kita harus memberinya isi, dimana kuncinya adalah transformasi diri."

Berbagai ucapan dan pesan solidaritas berdatangan dari penjuru dunia, antara lain dari Occupy Oakland dan Occupy Barcelona yang menyatakan bahwa apa yang berlangsung di Cheran K'eri juga berkaitan dengan kota mereka. Beberapa aktivis, akademisi, jurnalis, dan guru komunitas seperti John Holloway dan Michael Lowy juga mengirim pesan yang serupa, bahwa keberhasilan di Cheran adalah untuk seluruh Amerika, Yunani, Spanyol, Mesir dan seluruh dunia. Pertemuan nasional ini diharapkan dapat mengulang kesuksesan pertemuan Melawan Neoliberalisme yang digelar oleh gerakan Zapatista 1994 lampau.

Cheran adalah sebuah kota kecil di Meksiko yang sudah setahun ini kendali dan pengolaannya berhasil diambil-alih dan dikelola oleh warganya sendiri secara otonom, partisipatif dan berbasis pada kesetaraan. Perlawanan besar-besaran secara popular meledak sejak April 2011 lalu. Melalui perjuangan penuh keberanian, warga Cheran menolak negara Meksiko dan kapitalisme yang menggerogoti sumberdaya alam, ekosistem dan budaya mereka. Warga Cheran juga menolak keterlibatan dan intervensi elit dan partai politik dalam kehidupan mereka . Slogan-slogan seperti "Tidak untuk Partai Politik", "Otonomi", "Lawan Neoliberalisme", bergema di seluruh kota maupun dalam pertemuan ini. Untuk mempertahankan otonomi dan kehidupan mereka, warga membentuk Dewan Kota Cheran, dan menggalang solidaritas dari luar.

Perjuangan ini mengingatkan kita pada gerakan Zapatista di wilayah Chiapas, Meksiko Tenggara, yang masih eksis hingga kini, maupun Komune Oaxaca.

[Ishmael]

TERLIBATLAH DALAM PERJUANGAN

BERGABUNG DENGAN SERUM, PROYEK PENERBITAN KORAN OTONOM.

SEBAGAI :

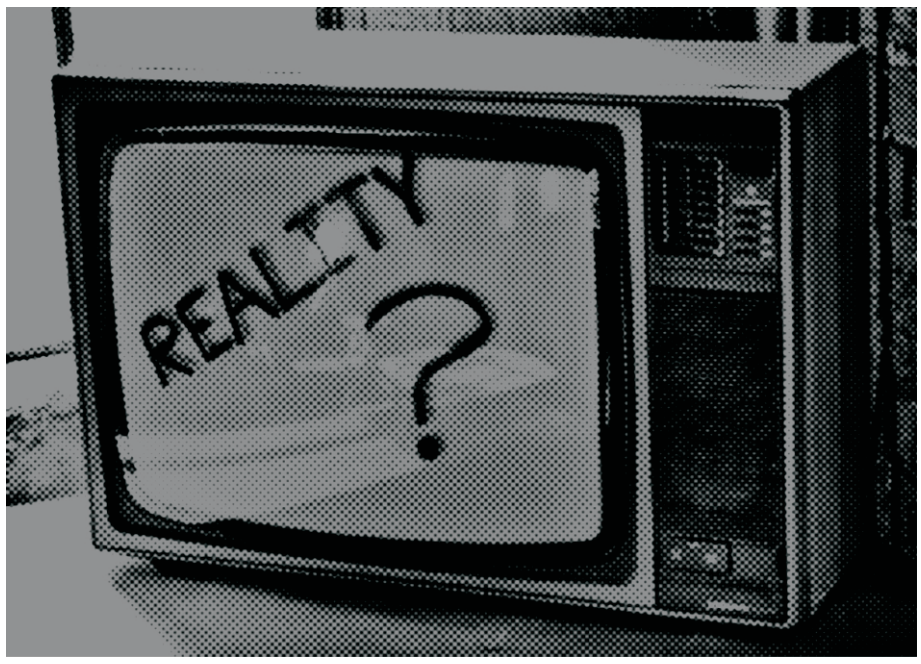
- EDITOR
- REPORTER
- KONTRIBUTOR
- PENATA LETAK
- FOTOGRAFER
- ILUSTRATOR
- SIRKULASI

DAFTAR DAN IKUTI WORKSHOPNYA!

INFO LANJUT HUBUNGI KAMI DI ALAMAT KONTAK TERCANTUM.

SERUM
Untuk Perjuangan Melawan Kapitalisme dan Negara

Sebuah *Show* Yang Tidak Realistis



Kehidupan yang diangkat ke layar kaca atau yang disebut dengan reality show, bukan hal yang asing lagi bagi penonton di Indonesia. Di berbagai stasiun televisi, acara sejenis ini sangat mudah ditemui. Temanya seputar problema hidup, pencarian bakat, persaingan, kisah kehidupan sehari-hari, religi, pencarian pasangan hidup, ataupun potret kehidupan kaum miskin. Sederet acara seperti Realigi (Trans TV), Termehek - Mehek (Trans TV), Jika aku menjadi (TransTV), Bedah Rumah (RCTI), Minta Tolong (RCTI), Dibayar Lunas (RCTI), Uang Kaget (RCTI), Orang Pinggiran (Trans 7), menggambarkan realitas kehidupan dalam adegan yang 'seakan-akan benar-benar terjadi tanpa skenario'.

Boleh dikata reality show menjadi salah satu tayangan favorit penonton. Daya tariknya adalah isi cerita dan ketokohan yang sangat dekat dengan kehidupan harian masyarakat, sehingga mampu menyerap emosi penonton untuk larut dalam perasaan campur aduk: jengkel, marah, sedih, atau terharu. Hasil survey AC Nielsen, menyebutkan bahwa beberapa judul reality show berada di daftar urutan program dengan rating teratas mengalahkan program sinetron. Hal ini dapat dilihat dari makin banyaknya jenis tayangan reality show dan durasi tayangnya yang terus bertambah. Dari hanya 4 jam menjadi hampir 8 jam perhari. Acara "Termehek-Mehek" yang sempat popular dua tahun lalu sempat berada dalam rating teratas, termasuk acara "Jika Aku Menjadi" yang tayang setiap sore di Trans TV.

Tetapi semenarik dan sebagus apapun tayangan demikian memikat mata penonton, banyak hal yang perlu dicermati secara mendalam. Apakah tayangan reality show memang menyajikan realitas yang sesungguhnya? Ini adalah unsur yang sering dipertanyakan dalam tayangan seperti ini.

Kebanyakan reality show tidaklah mengangkat realitas secara utuh namun merupakan hasil konstruksi bahkan rekonstruksi televise, yang memuat unsur rekayasa baik dari cerita serta intrik yang disajikan. Contohnya seperti Termehek-mehek yang mendapat sorotan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dimana diketahui bahwa acara tersebut hanyalah skenario. Walau diangkat dari cerita nyata, namun adegan yang ditayangkan bukanlah realitas yang terjadi, sehingga dianggap sebuah kebohongan.

Reality show lebih banyak menggunakan rekayasa bahkan kamera tersembunyi yang lebih mementingkan unsur show-nya ketimbang reality. Dalam industri pertelevisian, rekayasa ini menjadi kebutuhan penting agar sebuah tayangan menjadi menjadi lebih menarik. Dramatisasi yang menonjol ditambah sudut pandang kamera, audio, dan alur penceritaannya mampu menarik penonton untuk larut. Hal ini terlihat dari penonjolan adegan isak tangis, emosi yang meluap-luap, kepanikan, ketakutan atau keterpurukan. Hal-hal yang sensional dan emosional diekploitasi untuk menjawab karakteristik tontonan masyarakat umumnya, sehingga jadilah acara tersebut meraup rating tinggi.

Dalam industri pertelevisian, rating memang menjadi salah satu tolak ukur pencapaian sebuah acara. Stasiun-stasiun televisi berlomba menjual program yang dapat menarik perhatian penonton, termasuk tayangan yang menjual mimpi-mimpi lewat kemewahan, hidup yang serba wah, figur yang mengumbar fisik, mengekspos bahkan mengeksploitasi kemiskinan, serta mengobral berbagai gambaran semu.

Bedah Rumah misalnya. Saat rumahnya 'dibedah', sang pemilik rumah dan keluarganya dibawa ke tempat mewah seperti hotel berbintang untuk menikmati kamar mewah, menyantap makan lezat di restoran, mengendarai mobil mewah. Ini mempertontonkan hal-hal yang sangat ekstrim dari kehidupan orang-orang miskin, dan kemewahan tersebut dianggap sebagai perwujudan dari kebahagiaan. Atau 'Uang Kaget' yang mengeksploitasi kemisikinan, saat seorang miskin diberi uang jutaan rupiah dimana ditampilkan wajah berkeringat dan tangan gemetaran si miskin, lengkap dengan guratan-guratan muka, bibir yang gemetar dan matanya yang nanar karena setumpuk uang tersebut harus habis dibelanjakan barang apapun dalam hitungan menit.

Sementara dalam 'Jika Aku Menjadi' membawa kita pada suasana pedesaan yang indah asri, dan menghadirkan seorang gadis kelas menengah yang berasal dari kota. Beberapa hari dia menghabiskan waktunya bersama keluarga miskin di sebuah desa, untuk merasakan kerasnya bertahan hidup di tempat tersebut. Acara ini memperlihatkan bagaimana si gadis yang biasanya hidup di kota, dengan berbagai fasilitas, teknologi dan transportasi, secara tiba-tiba harus berada dalam lingkungan yang berbeda. Bekerja sebagai tukang batu, pencari pasir di sungai, atau berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk mengais dedaunan dan tanaman di sekeliling untuk dijual. Akhir cerita ditutup isak tangis, saat si gadis harus pulang dengan membawa pelajaran bahwa ia harus lebih bersyukur dengan kehidupannya yang 'lebih baik', bahwa hal-hal yang berasal dari kota dan kehidupan mapan kelas atas adalah kehidupan yang layak.

Tayangan demikian menyiratkan pandangan yang seragam bahwa kebahagiaan hidup sebatas pada pencapaian tujuan-tujuan materil. Tindakan moral dan wujud simpati yang ditunjukkan hanya dengan memberikan uang, emas, benda-benda elektronik, memperbaiki rumah, memberikan perabotan. Hal-hal tersebut dipandang telah mengeluarkan orang-orang miskin dari kesengsaraan. Secara tidak langsung ini membentuk cara pandang atas nilai-nilai modern dengan mengagungkan materi sebagai tujuan hidup, dan memapankan anggapan bahwa kehidupan desa yang berbaur dengan alam merupakan ketertinggalan, sebagaimana istilah kampungan yang digunakan sebagai ejekan bagi mereka yang jauh dari perkembangan dunia modern.

Tidak hanya itu. Kemiskinan dan kemalangan yang dipertontonkan dianggap sebagai realitas yang menjadi takdir kehidupan. Bahwa kaya dan miskin semata-mata merupakan hal yang telah ditetapkan Tuhan, yang diperlihatkan dalam adegan berdoa saat si tokoh merasakan kemalangan, agar kehidupan mereka berubah. Harapan tersebut kemudian seolah terwujud di akhir cerita saat orang-orang miskin tersebut dihadiahi barang-barang yang selama ini mereka tak dimiliki. Ini sungguh menjual mimpi-mimpi pada kaum miskin lain agar kelak dapat merasakan hal sama.

Disini, kemiskinan hanya dilihat sebagai objek tanpa pernah melihat persoalan secara mengakar. Seperti pertanyaan yang muncul jika kita menyaksikan adegan seseorang yang penuh peluh bekerja membanting tulang, berjalan berkilo-kilo meter, namun hanya mendapat sedikit uang, dan mereka tetap saja miskin. Sementara di tempat lain ada yang hanya tinggal duduk tapi bergelimang harta. Atau mengapa petani-petani di desa tak lagi punya tanah dan terpaksa menjual tenaga di kebun atau tanah orang lain. Reality show tidak pernah menjawab hal ini.

Dalam layar kaca, dunia menjadi lebih sempit, sesempit nilai kehidupan yang tayangkan dalam reality show. Hanya dengan duduk di depan layar kita seolah berkelana jauh, masuk dalam kehidupan orang lain, larut dalam emosi dan sensasi, ikut dalam tawa, jengkel, iba, haru, atau tangis. Namun saat tayangan berakhir dan si tokoh menutup cerita, sekejap pula seluruh sensasi itupun menguap, lalu kita kembali dalam kenyataan yang sebenarnya. Tetapi apakah hal itu akan membuat kita menengok kenyataan hidup, yang bahkan mungkin berada di samping rumah kita? Seharusnya empati dan solidaritas dapat terwujud langsung dalam aksi, dan bukan berupa isak tangis yang semu. Tentunya tanpa perlu perantara layar kaca, kamera, atau adegan dramatis.

[Alisa]

(Agar) Bukan Sekedar Komedi

Belakangan ini sebuah event yang disebut "Standup Comedy" semakin ramai dan menyebar di berbagai kota di Indonesia. Penikmatnya pun tak hanya kalangan tertentu saja, hampir semua orang menyukai hiburan yang satu ini. Apalagi acara ini tak hanya membawakan lawakan, namun juga kritikan untuk diri sendiri, khususnya terhadap pemerintah.

Apakah Standup Comedy itu? Bagaimanakah awal mula munculnya hiburan yang satu ini?

Menilik sejarahnya, Stand Up Comedy telah ada sejak abad ke 18 di Eropa dan Amerika. Disana para komedian ini biasa disebut dengan "standup comic". Para comic ini biasanya memberikan beragam cerita humor, lelucon pendek atau kritik-kritik berupa sindiran terhadap sesuatu hal yang sifatnya cenderung umum dengan berbagai macam sajian, gerakan dan gaya.

Pada awalnya, sebelum Perang Saudara terjadi di Amerika tahun 1861 , standup comedy berwujud teater. Sebuah kelompok teater bernama "The Minstrel Show" yang diselenggarakan oleh Thomas Dartmouth "Daddy" Rice adalah kelompok yang dikenali sebagai kelompok pertama yang menyelenggarakan acara ini. Sayangnya, acara yang mereka bawakan ini tergolong rasis, mengandung unsur sara yang amat kental. Apalagi pada saat itu, mic belum diciptakan, hingga para pelawak ini dengan kasarnya menggunakan lawakan "slapstick" alias menggunakan fisik sebagai bahan ejekan.

The Minstrel Show kemudian mulai berkembang dan akhirnya semakin menjurus ke teater musikal yang bertema komedi. Pada segmen kedua acara ini (disebut The Olio), yang dibawakan oleh grup "The Endmen" berjumlah dua orang, menggunakan model pidato untuk menyindir para politisi saat itu. Hingga pada awal abad ke-20 , muncullah sebuah show tandingan yang bernama "Burlesque". Acara ini mengadopsi pola dari kelompok The Endmen, menggunakan standup comedy untuk mengkritisi para politikus, serta menjadikan model acara ini lebih santai dan akrab, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.

Di Indonesia sendiri, standup comedy awalnya didirikan di sebuah kafe bernama Comedy Café yang dikelola oleh Ramon Papana, Taufik Savalas dan para personil Warkop DKI, yaitu Dono, Kasino, Indro. Namun hal ini kurang booming. Kini Stand Up Comedy kembali bermunculan untuk memberi alternatif hiburan di tengah semaraknya hiburan komedi yang juga hanya menggunakan fisik sebagai objek tertawaan.

Mort Sahl, adalah salah satu komedian Amerika yang memberi sebuah awal baru bagi komedi. Pada akhir era 60-an hingga awal 70-an, sebuah masa kejam di mana Pemerintah Amerika menuding orang-orang yang berani mengkritik mereka sebagai anggota kelompok Komunis, Mort Sahl menghadirkan standup comedy yang lekat dengan kritikan dan kecaman terhadap pemerintahan saat itu. Ia mengumpulkan data-data kejahatan negara yang ada di koran lalu kemudian menjadikannya materi lawakannya yang pedas. Referensi komedinya pada saat itu mungkin takkan lagi lucu jika dilihat saat ini. Meski akhirnya meredup, namun tetap saja semangat yang ia bawakan dalam lawakannya tak mati.

Beberapa rentang waktu kemudian seorang bernama Lenny Bruce membawa nyala semangat yang tersisa dari Mort Sahl. Ia menambahkan sisi "pengalaman pribadi" serta mengajak penontonnya untuk mulai membuka diri dan membicarakan permasalahah yang dihadapi bersama. Menyajikan hal-hal seperti ini membuatnya beberapa kali ditangkap oleh aparat. Selanjutnya semangat itu dilanjutkan oleh George Carlin, Richard Pryror, yang kemudian mengembangkan cara yang berbeda untuk kembali membakar dan membagikan semangat pemberontakan yang sama.

Melompat dari kebiasaan para komedian sebelumnya, Sahl dan Bruce memberikan ide, bahwa mikrofon bukanlah sekedar alat untuk semata menertawai dan menghibur, namun juga sebagai alat untuk menguak kebohongan negara beserta aparaturnya. Komedi juga sebagai media untuk menyebarluaskan semangat akan adanya kemungkinan untuk menjadikan dunia ini lebih baik, serta untuk menjadikan hidup ini lebih layak. Seperti yang diucapkan oleh George "Menurutku semua orang seharusnya diijinkan untuk melakukan segala hal yang mereka inginkan. Kita belum melakukannya hingga saat ini. Mungkin saat ini akan berhasil"

Hingga titik ini, kita telah melihat kembali standup comedy dari awal hingga perkembangannya, dan sudah sepantasnya apabila kita bisa menyajikan acara ini dalam corong yang berbeda dan lebih sesuai konteks yang tengah kita hadapi di Indonesia. Tak lagi perlu menyajikan lelucon yang mengejek fisik orang-orang yang mereka cerca, tak lagi perlu menjadikan hal-hal sensitif suku/golongan/ras sebagai objek tertawaan hanya untuk memecah-belah keberpihakan.

Belajar dari gaya The Endmen, Mort Sahl, Lenny Bruce , George Carlin, serta Richard Pryror yang menggunakan standup comedy sebagai ajang untuk melampiaskan kemarahan dan melucuti Negara serta aparaturnya melalui candaan a la komedi jalanan dalam berbagai macam bentuk, semestinya kita bisa menjadikan hiburan ini sebagai wadah berbagi cerita mengenai kejahatan negara dan korporasi serta menyalurkan amarah-amarah yang ditimbulkannya. Tak perlu takut, bila mereka tersinggung lalu kemudian marah, yang tampak bodoh adalah mereka juga. Komedi tak semestinya mereka respon seserius itu jika mereka memang terbukti tak bersalah.

[Nurul Huda]



BUTUH BERAPA PEMILU UNTUK MERUBAH KEHIDUPAN ?
TINGGALKAN CARA USANG, BERTINDAK SEKARANG !

Kapan terakhir kali orang yang kau pilih memikirkan nasibmu? **info lanjut klik : www.kontinum.org/kampanye**